PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs Kalimantan Timur

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Tahun 2019 – 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong pelaksanaan TPB/SDGs dilakukan secara inklusif oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan TPB/SDGs terus menerapkan prinsip "tidak ada satupun yang tertinggal atau *"no one left behind"* sebagai prinsip utama TPB/SDGs baik di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai wujud dedikasi dalam mengukur pencapaian TPB/SDGs, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs di tahun 2019. Laporan TPB/SDGs tahun 2019 ini adalah laporan tahunan pertama sebagai hasil dari pemantauan dan evaluasi atas progres dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya ditetapkan pada RAD 2019-2023. Proses penyusunan laporan ini juga dilakukan secara inklusif, partisipatif dan terbuka dengan melibatkan seluruh platform dari unsur pemerintah, akademisi, CSO, dan filantropi, yang dilakukan melalui konsultasi secara tatap muka *(offline)* maupun secara media virtual *(online)*.

Hasil dalam laporan ini menjelaskan capaian target-target yang diukur dengan indikator TPB/SDGs yang terdiri dari yang telah tercapai, memiliki kecenderungan kemajuan yang akan tercapai, serta yang memerlukan perhatian khusus. Mengingat tahun 2030 hanya tinggal satu dekade lagi, pencapaian TPB/SDGs harus menjadi fokus dan perhatian kita selama 10 tahun ke depan. Dengan terjadinya pandemi COVID-19, TPB/SDGs menjadi semakin relevan untuk terus dilaksanakan sebagai upaya membangun kembali yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya kami berharap semoga laporan ini dapat membantu semua pihak untuk terus meningkatkan aksi dan strategi serta kolaborasi yang aktif untuk mencapai TPB/SDGs di tahun 2030.

Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs 2019 tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih masukan dan pemikiran kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini.

Samarinda, Desember 2020

Dr. Ir. H. M. Aswin, MM
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Selaku Ketua Pelaksana TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur

1 TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

I. PENDAHULUAN

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun merupakan tujuan pertama dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan perlindungan sosial, meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, dan membangun ketahanan terhadap dampak bencana alam dan non alam yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya dan mata pencaharian masyarakat.

Pembahasan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan difokuskan pada capaian tingkat kemiskinan, serta cakupan perlindungan sosial dan pelayanan dasar, dengan cakupan seperti :

TARGET	DESKRIPSI
Target 1.2	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Target 1.3	2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 4. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 5. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Target 1.4	6. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) 7. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah) 8. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) 9. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) 10. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah) 11. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) 12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) 14. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah) 15. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)
Target 1.5	16. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 17. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 18. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 19. Pendampingan psikososial korban bencana sosial 20. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. 21. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 22. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 23. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

II. STATUS CAPAIAN

- Tren kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 5,91 persen, menurun 0,03 persen poin disbanding dengan Maret 2019 yang sebesar 5,94 persen. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2019 sebanyak 220,91 ribu (5,91 persen). Pada Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu (5,94 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 990 orang (namun secara persentase turun 0,03 persen poin).
- Selama Maret 2019 – September 2019, garis kemiskinan naik sebesar 4,85 persen, yaitu dari Rp. 609.155,- per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp. 638.690,- per kapita per bulan pada September 2019.
- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan secara persentase,

namun mengalami kenaikan secara absolut.

- Angka kemiskinan Provinsi Kaltim pada September 2019 berada pada posisi 8 terendah di Indonesia.
- Pada September 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,43 persen, naik 0,19 poin disbanding angka Maret 2019 yang sebesar 20.24 persen, Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) pada tahun 2019 mencapai 98,76, merupakan tertinggi ke-9 di seluruh provinsi Indonesia.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) mencapai 66,16, merupakan tertinggi ke-3 di seluruh provinsi Indonesia.
- Perkembangan tenaga kerja aktif penerima upah (formal) tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur pertumbuhannya naik sebesar 4% dibanding tahun 2018. Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja bukan penerima upah (informal) tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar -0.41% dibanding tahun 2018.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS, Dinas Sosial, BKKBN	%	6,03	6	5,94	●
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							

1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	72,83*	-	83,11	●
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	-	-	6,07	●
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DISDIK	%	96,61* (2017)	96,81	98,76	●
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	63,17*	63,37	66,16	●
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD Kaltim	Lokasi	24	0	12	●
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa		35	1.320	●

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dinilai dari persentase penduduk miskin. Upaya pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengentaskan kemiskinan terlihat dari tren penurunan tingkat kemiskinan di Kaltim. Persentase kemiskinan berada di atas rata-rata nasional, sehingga tetap perlu untuk mempertahankan peran antarsektor dalam penanganan kemiskinan di Kaltim.

Keberhasilan pembangunan daerah juga harus diiringi oleh penguatan pengurangan risiko bencana daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya pengurangan risiko bencana daerah dengan membentuk desa tangguh bencana di beberapa daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2019 mencapai 12 des. Pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan setiap tahunnya akan bertambah dalam rangka mengantisipasi dampak bencana baik dari segi materi maupun jiwa.

Sementara untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial yang terjadi di beberapa daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya koordinasi dan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur maupun dengan pihak-pihak lainnya serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Timur	6.23	6.11	6.19	6.03	5.94
Indonesia	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02

Gambar 01. Persentase Kemiskinan Prov. Kaltim Tahun 2015 – 2019

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2019, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 12,36 juta rupiah per tahun, atau bertambah 442 ribu rupiah dibandingkan tahun 2018. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun.

APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 - 2019 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan. Peningkatan APM Kelompok Penduduk 40% terbawah ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	%	87,98%	98% (Capaian 89% Sept 19) UHC (Universal Health Coverage)	89%	▼
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenaga-kerjaan	Formal (%)	520.496 *(Angka Absolut)*	587.120	538.998	▼
			Informal (%)	69.922	103.189	41.592	▼
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	81,70*	81,90	79,45	▼
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, *e-infoduk* DKP3A	%	92,22	-	89,37	▼

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini juga merupakan tantangan secara nasional, karena kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan belum maksimal dimiliki terutama oleh Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) dalam skala kecil dan mikro.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) masih belum mencapai target di Kaltim. Meskipun masih berada di level tengah, yakni peringkat ke-13 di seluruh Provinsi Indonesia. Begitu pula halnya dengan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah) masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat mendaftarakan legalitas identitas keluarganya dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas identitas penduduk.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kaltim ialah dihadapkan pada sulitnya menurunkan angka kemiskinan, di mana hal ini perlu menjadi perhatian terutama bagi tim penanggulan kemiskinan di Kaltim, serta perlunya untuk melihat sebaran penduduk miskin secara faktual untuk menemukan kebijakan yang tepat guna mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama dalam menggali potensi ekonomi masayrakat di kawasan penduduk miskin.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga perlu di stimulasi dengan hadirnya pemerintah dalam pengembangan potensi wilayah sekitarnya, didukung dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menambah keahlian masyarakat miskin, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya, serta menciptakan peluang usaha untuk menambah penghasilannya.

Selain itu, beberapa tantangan lain antara lain: 1) penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang belum merata terutama di daerah-daerah sulit dengan kondisi geografis sulit dan infrastruktur yang belum memadai; 2) permasalahan akurasi data yang menyebabkan masih tinggi exclusion dan inclusion error; dan 3) keterkaitan program yang berbasis bantuan dan pengurangan beban ke strategi peningkatan pendapatan yang belum optimal dilaksanakan.

Terkait kepesertaan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan nasional yakni masih ada Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU) yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terutama PK/BU pada skala kecil dan mikro. Selain itu pula kecilnya kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (informal) dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah. Selain upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengakuisisi kepesertaan maka perlu adanya dukungan dari stakeholder (seperti Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja) dalam mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat luas baik pekerja formal dan informal.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ke depan sesuai dengan RPJMD 2019–2023 diarahkan pada kebijakan utama, yaitu:

1) Pengembangan Fasilitasi dan Pendampingan Permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam pengurangan risiko bencana

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1

TPB, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2) Program pembinaan anak terlantar
3) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
4) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
5) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
6) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
7) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
8) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
9) Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana
10) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
11) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengemabngan Sumber Daya Masyarakat melalui Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Beasiswa;
12) Progam Penanggulangan Kemiskinan BIdang Pendidikan melalui Kegiatan Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMOLB, SMA/SMK/MA);
13) Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas melalui Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Menengah Atas;
14) Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Kegiatan Pemberian BOSDA Sekolah Menengah Kejuruan;

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah: Mitra binaan desa kreatif, pembinaan pekebun kecil, perhutanan sosial, kampung iklim+, dan pengembangan rencana bisnis.

Dalam peningkatan kepesertaan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan nasional, Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya tersebut ialah:

1) Sosialisasi masif program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan
2) Peningkatan efektifitas kerjasama kelembagaan / mitra kerja (Pemda, SKPD, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh, serta tokoh agama/masyarakat)
3) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerbitkan regulasi terkait pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan dimasing-masing daerah.
4) Kerjasama dengan pihak terkait seperti pegawai pengawas, Kejaksaan dan KPKNL dimasing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk menegakan kepatuhan perusahaan/PKBU
5) Peningkatan kolaborasi perbankan melalu SPO untuk perluasan kepesertaan dan pelayanan klaim.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Upaya mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan dilakukan intervensi kebijakan dengan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan pemukiman yang layak. Disamping itu juga dilakukan dengan memberikan bantuan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat miskin dalam memperoleh permodalan usaha.

Terkait upaya dalam peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan nasional ialah dengan melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat akan pentingnya program manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti melalui media massa, media luar ruang ataupun interaksi langsung dan menyasar kepada potensi-potensi yang belum menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS, Dinas Sosial, BKKBN	%	6,03	6	5,94	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	%	87,98%	98% (Capaian 89% Sept 19) UHC (Universal Health Coverage)	89%	▼

1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenaga-kerjaan	Formal (%)	520.496 *(Angka Absolut)*	587.120	538.998	▼
			Informal (%)	69.922	103.189	41.592	▼
1.3.1.(c)	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	BPS, Dinsos, BPJS Kesehatan	Orang	877	350	350	●
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinsos, Susenas	KPM	50 (APBD) 65.419 (APBN)	50 (APBD) 66.229 (APBN)	36 (APBD) 66.229 (APBN)	●
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS, Dinkes	%	81,34* (2017)	100	84,21	▶
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS, Dinkes	%	44,84* (2017)	80	53,1	▶
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	71,71 (2017)	-	73,24	▶

1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	72,83*	-	83,11	●
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DPU	%	-	-	6,07	●
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, DISDIK	%	96,61* (2017)	96,81	98,76	●
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	81,70*	81,90	79,45	▼
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	63,17*	63,37	66,16	●
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, *e-infoduk* DKP3A	%	92,22	-	89,37	▼
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	DESDM, TNP2K	%	91,97	-	98,88	●
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.a							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Kaltim	Jiwa	740	31	-	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD Kaltim	Lokasi	24	0	12	●

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa		1.518	1.687	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD Kaltim	Indeks Resiko Bencana	0	145	-	
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD Kaltim	Rupiah	3.665. 574.000	0	-	
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD Kaltim	Doku-men	1	0	-	

2 TANPA KELAPARAN

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

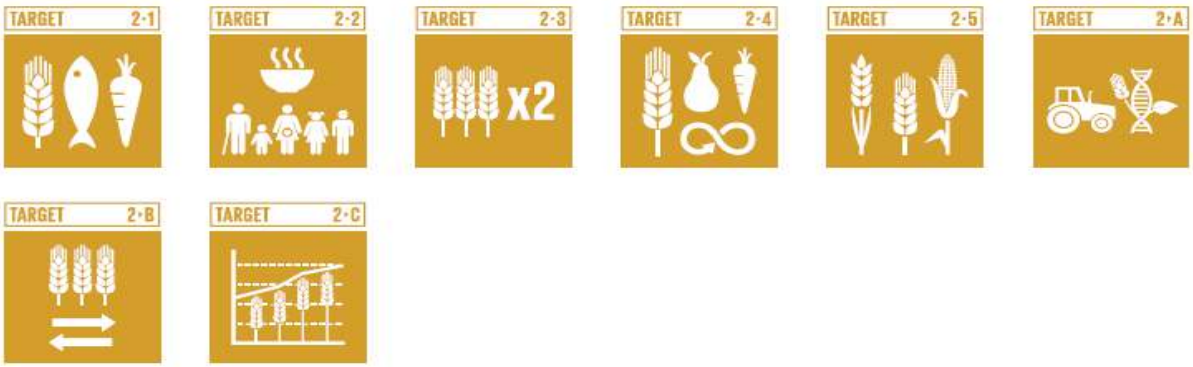

I. PENDAHULUAN

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik serta pertanian yang berkelanjutan pada tahun 2030 merupakan tujuan kedua dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih baik serta promosi pertanian berkelanjutan yang lebih luas. Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil menjadi prioritas untuk memastikan setiap orang memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan berkualitas untuk menjalani hidup sehat.

Laporan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ini akan membahas capaian perbaikan gizi dan penyediaan pangan, dengan cakupan indikator SDGs sebagai berikut: (1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan; (2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan; (3) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita; (4) Prevalensi malnutrisi (wasting) anak pada usia kurang dari 5 tahun, (5) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan (6) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu diuraikan pula tentang tantangan dan kebijakan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi dan penyediaan pangan.

II. STATUS CAPAIAN

- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Kalimatan Timur tercatat sebesar 7,02%.
- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tetapi proporsinya masih cukup tinggi yaitu sebesar 28,1% pada tahun 2019 (hasil SSGBI 2019) angka prevalensi ini juga masih di atas standar Besaran Masalah Kesehatan menurut WHO dimana *cut off point*-nya adalah sebesar 20%.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 82,5 (2013) menjadi 85,8 (2019).

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Akses Konsumsi Dan Kecukupan Pangan Makin Membaik

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)	Dinas Pertanian , Susenas BPS	%	-	-	7,02	●
2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	dinas pertanian, Susenas BPS (dihitung BPS)	%	-	-	13,17	●

Untuk mengetahui kecukupan konsumsi energi masyarakat, dapat diukur melalui indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) / PoU. Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan provinsi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kalimantan Timur pada Tahun tahun 2019 sebesar 7,02% pada tahun yang mana lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 7,66%. Dari capaian indiKator PoU tersebut menggambarkan kurang lebih

terdapat 254 Ribu Jiwa Penduduk Kaltim yang tidak cukup konsumsi energi dari makanan yang dikonsumsi.

Selain itu, menurut Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004, standar nasional kecukupan gizi adalah 2000 kkal per orang per hari. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga mengaitkan konsumsi energi dengan kerawanan pangan di mana persentase penduduk rawan pangan ditunjukkan oleh persentase penduduk dengan konsumsi kurang dari 1400 kkal per hari. Pada Provinsi Kalimantan Timur tercatat Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari sebesar 13,17% pada Tahun 2019 yang mana lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional yang sebesar 8,23%. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus agar proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal/kapita/hari tersebut dapat diturunkan hingga dibawah rata-rata nasional.

Pola Konsumsi Pangan Penduduk Makin Membaik

TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	85, 8	●
		Dinas Kelautan	Kg/Kapita/Tahun	48	50	53,09	●

Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Kaltim cenderung membaik membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 82,5 (2013) menjadi 85,8 (2019). Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pangan, pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi, aksesibilitas fisik dan ekonomi telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun, keragaman konsumsi pangan tetap menjadi tantangan untuk terus ditingkatkan. Sehingga, penganekaragaman konsumsi pangan masih perlu ditingkatkan, utamanya konsumsi pangan hewani, serta sayur dan buah.

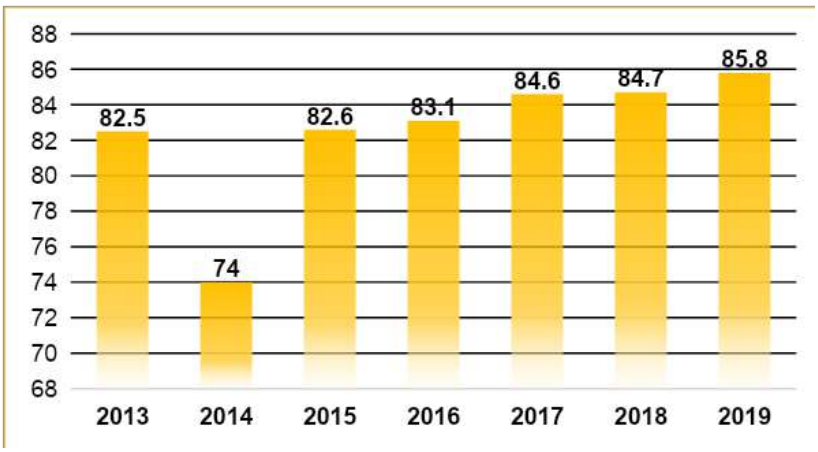

Gambar 01. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Tahun 2009-2019
(Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, 2020)

Sejalan dengan hal tersebut, Angka Konsumsi Ikan Kalimantan Tmur juga cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2019, Angka Konsumsi Ikan Provinsi Kaltim mencapai 53,09 kg/kap/tahun. Hal ini dapat dicapai salah satunya implementasi program Gemarikan yang dilaksanakan secara terstruktur mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Di Kaltim sendiri, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Tim dalam implementasinya, Gemarikan dilaksanakan terstruktur mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Di Kaltim sendiri, DKP Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap-tiap kabupaten/kota bahkan masuk ke setiap Tim PKK di kelurahan hingga desa-desa.

Perbaikan Gizi

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes, Susenas BPS	%	29,4	28,9	28,1 RAD-PG 30 BPS	●
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.	Dinkes, BPS	%	70,7	50	78,53 Dinkes 71,08 BPS	●
2.2.2.(c)	(i) Kualitas konsumsi pangan yang	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	85, 8	●

	diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Kelautan	Kg/Kapita/Tahun	48	50	53,09	●

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Kaltim cenderung menurun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, meskipun proporsinya masih cukup tinggi yaitu sebesar 21,3 % atau lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 27,7% pada tahun 2019. Untuk dapat memenuhi target nasional terhadap penurunan stunting pada 2024 menjadi 14% maka dibutuhkan laju penurunan stunting ditiap tahunnya sebesar 2,96%.

Adapun untuk metode survey pada pengambilan data hasil Riskesdas dan SSGBI maupun data rutin dari e-PPGBM berbeda, survey Riskesdas menggunakan blok sensus, sedangkan SSGBI dari blok sensus hasil Susenas dan e-PPGBM yang merupakan pelaporan real time dari Tenaga Pelaksana Gizi di Puskesmas se Kaltim by name by address. Jadi walaupun angka stunting terlihat turun namun harus dipertimbangkan metode penelitian dan pengambilan datanya, harapannya data status gizi umumnya dan stunting khususnya bisa terlihat secara online melalui aplikasi e-PPGBM dari tingkat pusat hingga ke desa.

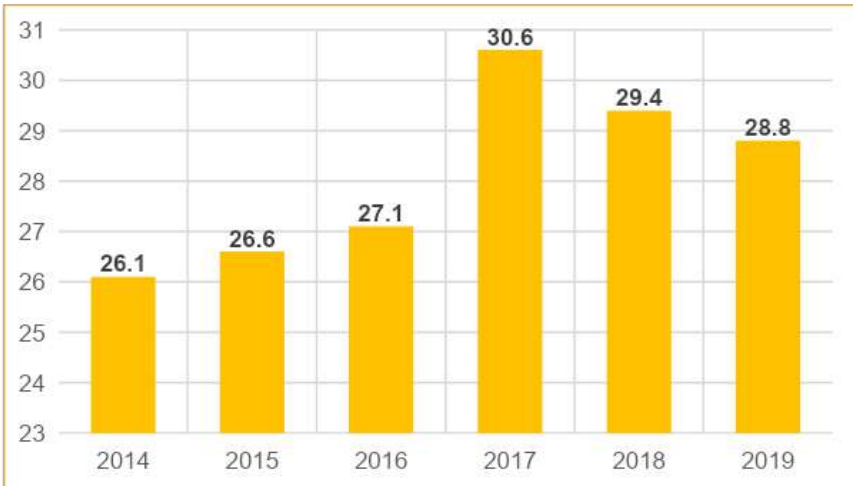

Gambar 02. Prevalensi Balita Stunting, 2014-2019
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, 2020)

Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Produktivitas Pertanian meningkat

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	*Nama Indikator*	*Sumber Data*	*Satuan*	*Baseline*	*Target (2019)*	*Capaian (2019)*	*Status*
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
*2.3.1**	*Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)*	*Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN), BPS*	*Juta Rupiah/ tenaga kerja*	*118.241,5 (2016)*	-	*161.983 (ASEM)*	

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Tercatat pada Tahun 2019, Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 161.983 Juta Rupiah/ tenaga kerja yang mana lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 118.245 Juta Rupiah/ tenaga kerja. Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan setiap tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertanian mampu menghasilkan output atau nilai tambah yang semakin besar. Ini tentunya tidak terlepas dari upaya yang terus menerus dilakukan Pemerintah Daerah melalui program peningkatan produksi pangan strategis

Keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. (Nasional)	Dinas Peterna-kan	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	80.248.3	82.811,60	NA	
			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumate-ra)	50	100	105	

2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peterna-kan	Hewan Ternak	3000	10.000 (Hewan yg divaksin)	7.300	

Indikator Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Jumlah Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB). Dimana surat keterangan layak bibit yang dikeluarkan setiap tahunnya cenderung meningkat. Tercatat pada Tahun 2019 mencapai 105 SKLB dari tahun sebelumnya yang sebesar hanya 50 SKLB. Sertifikat berupa Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang diterbit Dinas Peternakan bagi hewan ternak sapi yang diperlihara suatu kelompok petani ternak merupakan garansi atau jaminan bibit ternak unggul sesuai pola SNI (standar nasional Indonesia). Sertifikat ini bagian dari upaya memotivasi para pembibit ternak di daerah agar terus meningkatkan kegiatan usahanya. Menghasilkan bibit ternak yang bagus juga menerima penghasilan yang bagus dari harga jual bibit sapi yang tinggi merupakan hal yang diinginkan setiap petani ternak perbibitan sapi.

Selain itu, Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui dijabarkan melalui hewan yang mendapatkan vaksinasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Tercatat pada Tahun 2019 jumlah hewan yang mendapatkan vaksinasi sebesar 7.300 hewan ternak atau lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 3.000 hewan ternak.Pemberian vaksinasi ini diharapkan terhindarnya hewan ternak Kaltim terhindar dari PHMS seperti Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, dan Jembrana

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Penurunan Anemia pada Ibu Hamil belum mencapai harapan

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ *wasting (berat badan/tinggi badan)* anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Dinkes, BPS		% (*wasting*)	7,5	7	9,09	▼
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes, BPS	%	15,16	14	18,91	▼

Prevalensi Malnutrisi/Wasting pada anak usia kurang dari 5 tahun menurun menjadi 9,09 pada tahun 2019 dengan sumber data dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat namun data ini kurang tepat jika dibandingkan dengan baseline data dari hasil survey mengingat data balita yang ditimbang dan diukur yang terentri dalam aplikasi tersebut hanya 15,9% dari seluruh jumlah sasaran balita se Kaltim

Prevalensi anemia pada ibu hamil meningkat dari 15,16% pada tahun 2018 menjadi 18,91% pada tahun 2019 (sumber data laporan rutin Dinas Kesehatan). Anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan janin, risiko kematian ibu, bayi berat lahir rendah (BBLR), abortus dan kelahiran premature serta resiko stunting pada bayi yang dilahirkan.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi pada anak, erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas Kesehatan.

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) Konversi lahan pertanian terus berlangsung sementara

perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, dan pasar; (3) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; (4) Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA); (9) Belum optimalnya Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas, masih ditemui beberapa kendala yaitu : (1) Petugas/SDM Kab/kota terbatas/kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah peternakan ; (2) Meningkatkan Motivasi dan Kompetensi Petugas dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan peternak ; (3) Mengedukasi peternak dalam hal manajemen budidaya ternak agar diperoleh ternak bibit yang bekualitas

Dalam upaya menekan angka Penyakit Hewan Menular Strategis masih ditemui beberapa kendala yakni : (1) Kesehatan ternak/hewan berpengaruh langsung pada produktifitas ternak, keamanan pangan asal ternak dan lingkungan, oleh karenanya meningkatkan dan menjaga status kesehatan ternak/hewan agar tetap baik secara terus-menerus merupakan tantangan yang harus dilalui agar tujuan tanpa lapar tercapai, dan (2) Resiko penyebaran penyakit dikarenakan lalulintas ternak/hewan yang tidak terkontrol/tidak terawasi secara optimal.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Dokumen RPJMD 2019-2023, arah kebijakan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan penyediaan pangan meliputi:

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T).
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
4. Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
5. Perbaikan penanganan pasca penen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani.

7. Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian.
8. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering.
9. Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
10. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dilakukan dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2 yaitu dengan :

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
2. Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
3. Pengembangan Produk Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu dan Hari Pangan Sedunia;
4. Pengawasan dan Sertifikasi Komoditi Pangan Segar.
5. Selain itu, untuk meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil, diperlukan berbagai upaya :
6. Memanfaatkan tenaga yang ada melalaui pembekalan atau peningkatan kapasitas dalam penaggulangan masalah Gizi
7. Rakor Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) dan Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG) Provinsi maupun Kab/Kota
8. Pemanfaatan data pada Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik (ePPGBM) dalam pengusulan dan perencanaan anggaran termasuk dalam usulan pemanfaatan dana desa dalam pengentasan masalah perbaikan gizi.
9. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM Petugas Peternakan di tingkat provinsi maupun kab/kota;
10. Memberikan Pelatihan Terhadap peternak bagaimana cara budidaya ternak yang baik ;
11. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota;
12. Membangun infrastruktur dan sistem pengawasan lalu lintas hewan terpadu antara pusat (karantina) dengan daerah (provinsi/kab/kota)

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernurishment)	Dinas Pertanian , Susenas BPS	%	-	-	7,02	●
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada anak balita.	Dinas Kesehatan, Susenas BPS	%	14,7	14,2	14,71 (dinkes) 11,5 (BPS)	●
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.	Susenas BPS, dinas Pertanian	%	420	418	NA	
2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	dinas pertanian, Susenas BPS (dihitung BPS)	%	-	-	13,17	●
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes	%	29,4	28,9	21,3% Dinkes 30% BPS	●
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinkes, BPS	%	-	-	18,20 % (pendek)/ BPS 11,80 % (sangat pendek)/ BPS	●
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ *wasting*	Dinkes, BPS	% (wasting)	7,5	7	9,09	▼

	(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		% (obesitas)	-	-	9,4	●
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes, BPS	%	15,16	14	18,91	▼
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif.	Dinkes, BPS	%	70,7	50	78,53 (DINKES) 71,08 (BPS)	●
2.2.2.(c)	(i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	85, 8	●
		Dinas Kelautan	Kg/Kapita/Tahun	48	50	53,09	●
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN), BPS	Rupiah/ tenaga kerja	118.241,5 (2016)	-	161.983. 118,80 (ASEM)	●
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.							
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. (Nasional)	Dinas Peterna-kan	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	80.248.3	82.811,60	NA	

			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumate-ra)	50	100	105	●
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peterna-kan	Hewan Ternak	3000	10.000 (Hewan yg divaksin)	7.300	▶

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

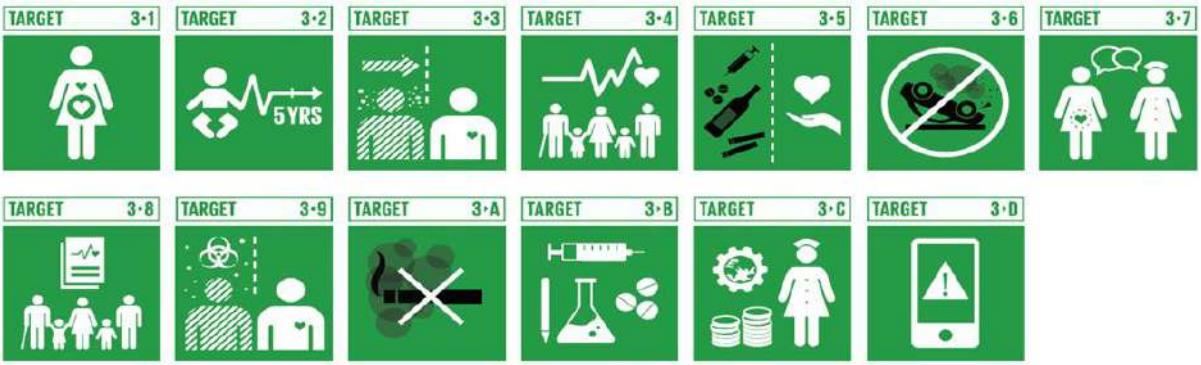

I. PENDAHULUAN

Upaya yang dilakukan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia adalah melalui beberapa target di antaranya:

TARGET	DESKRIPSI
Target 3.1	(1) Angka Kematian Ibu (AKI); (2) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.
Target 3.2	(3) Angka Kematian Balita (AKBa); (4) Angka Kematian Neonatal (AKN); (5) Angka Kematian Bayi (AKB); (6) Persentase kabupaten/kota mencapai 80% imunisasi dasar.

Target 3.3	(7) Prevalensi HIV pada populasi dewasa; (8) Insiden TB per 100.000 penduduk; (9) Kejadian malaria per 1.000 orang; (10) Jumlah kabupaten/kota eliminasi malaria; (11) Persentase kabupaten/kota deteksi dini Hepatitis B; (12) Jumlah orang memerlukan intervensi penyakit kusta dan filariasis; (13) Jumlah provinsi eliminasi kusta; (14) Jumlah kabupaten/kota eliminasi filariasis.
Target 3.4	(15) Persentase merokok penduduk umur ≤18 tahun; (16) Prevalensi tekanan darah tinggi; (17) Prevalensi obesitas penduduk umur ≥18 tahun; (18) Angka kematian akibat bunuh diri; (19) Jumlah kabupaten/kota dengan puskesmas menyelenggarakan kesehatan jiwa.
Target 3.5	(20) Jumlah penyalahguna narkotika dan alkohol yang mengakses layanan rehabilitasi medis; (21) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi; (22) Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat rehabilitasi social; (23) Jumlah Lembaga rehabilitasi sosial penyalahguna NAPZA yang dibantu; (24) Prevalensi penyalahgunaan narkoba; (25) Konsumsi alkohol penduduk umur ≥15 tahun.
Target 3.6	(26) Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
Target 3.7	(27) Proporsi PUS menggunakan kontrasepsi modern; (28) Prevalensi CPR semua cara (29) Angka penggunaan MKJP modern; (30) Tingkat kelahiran pada remaja (ASFR); (31) Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR).
Target 3.8	(32) Cakupan pelayanan kesehatan esensial; (33) Unmet need pelayanan kesehatan; (34) Jumlah penduduk tercakup asuransi kesehatan per 1000 penduduk; (35) Cakupan JKN.
Target 3.9	(36) Proporsi kematian akibat keracunan.
Target 3.A	(37) Persentase merokok penduduk ≥15 tahun.
Target 3.B	(38) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.
Target 3.C	(39) Kepadatan dan distribusi tenaga kerja.

Target 3.D	(40) Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.

II. STATUS CAPAIAN

- Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Meskipun cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan persalinan di fasilitas kesehatan cukup baik, namun kenyataannya kejadian kematian ibu di Kaltim masih sebesar 79 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Untuk mempercepat penurunan kematian ibu diperlukan komitmen dan terobosan-terobosan atau inovasi program untuk memenuhi target Roadmap SDGs Kaltim sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.
- Capaian Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini harus menjadi perhatian penting pemerintah Provinsi Kaltim dalam menganggulanginya.
- Kejadian Malaria di Indonesia berhasil dipertahankan di bawah 1%. Namun, target SDGs menurunkan Insiden Tuberkulosis (TB) hingga 297 insiden per 100.000 penduduk pada tahun 2019 memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya.
- Tren faktor risiko penyakit tidak menular seperti persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun, prevalensi tekanan darah tinggi, dan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun serta belum dapat memenuhi target RPJMN 2019.
- Tren konsumsi alkohol oleh penduduk umur ≥ 15 tahun sangat fluktuatif dan cenderung meningkat.
- Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun dan angka kelahiran total/*Total Fertility Rate* (TFR) menunjukkan penurunan, namun target RPJMN untuk menurunkan TFR sebesar 2,28 pada tahun 2019 belum tercapai.
- *Unmeet Need* Pelayanan Kesehatan mencapai 3,85 pada tahun 2019 dimana cenderung membaik pada Tahun 2017 sebesar 4,18.
- Fasilitas kesehatan yang memiliki paket obat esensial terus meningkat dari tahun ke tahun.
- Distribusi tenaga kesehatan telah menunjukkan kemajuan, dimana target RPJMN untuk RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis telah tercapai.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDU-DUK, SUTAS	Jumlah kemati-an ibu	74	90	79	●
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	96,44 (bps 2017)	100	96,39	▶
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,37 (bps 2017)	100	87,34	▶

Proses persalinan yang aman yaitu ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI. Pada awal pelaksanaan SDGs, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih telah mencapai 96,44% (Susenas, 2017) dan sedikit menurun menjadi 96,39% pada tahun 2019. Penurunan tersebut juga terlihat pada cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di daerah sebesar 87,34 atau sedikit lebih rendah dari capaian 2017 87,37%. Hal ini sejalan dengan cukup tingginya angka kematian ibu di Kaltim yang mana pada tahun 2019 tercatat sebesar 79%. Oleh karena itu terobosan dan inovasi kebijakan dengan daya ungkit tinggi harus dilakukan, terutama kebijakan yang spesifik wilayah dan tingkat sosial-ekonomi masyarakat.

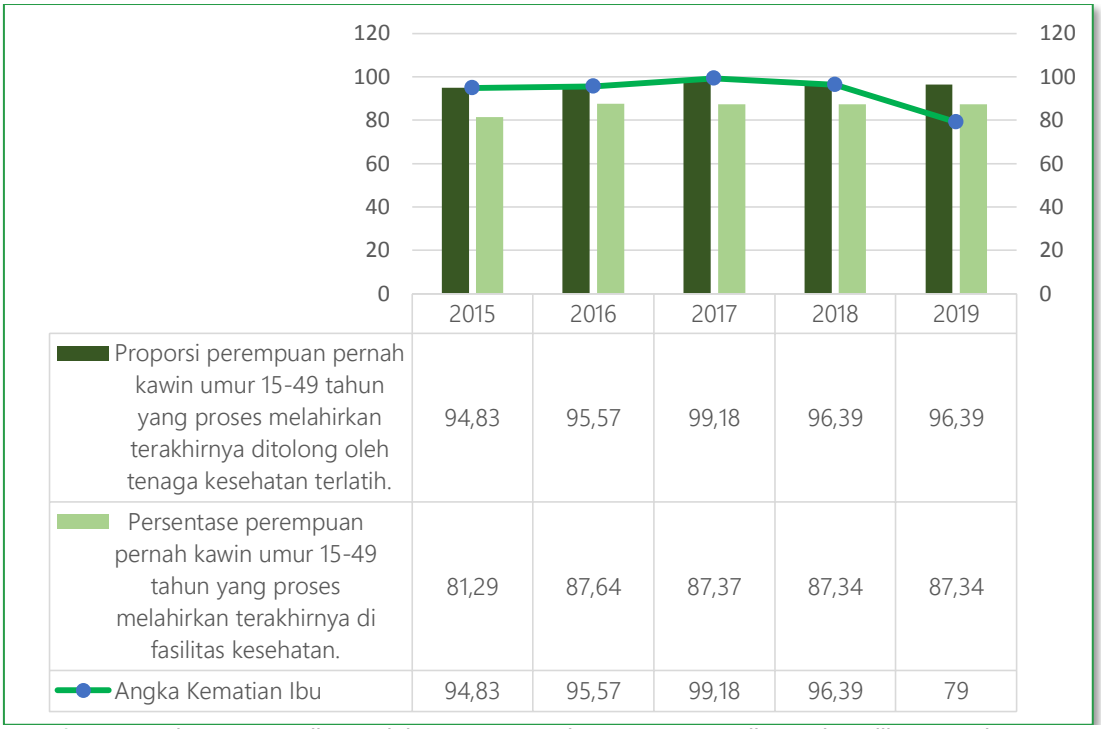

Gambar 01. Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan, 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim,SUSENAS 2019

Angka Kematian Balita (Akba), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (Akb) Cenderung Trend Menurun

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	54	77	61	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	498	473		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	608	581	529	●

3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes	%	90	80		

Capaian AKBa dan AKB terus menunjukkan trens penurunan sejak periode 2014 hingga tahun 2019 seperti terlihat pada Gambar 02. Tren penurunan tersebut menunjukkan target Roadmap SDGs tahun 2023 untuk mengurangi AKBa menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB 484 per 1.000 kelahiran hidup diperkirakan dapat tercapai pada tahun 2023. Namun untuk AKBa sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2019 yakni sebesar 61 per 1.000 kelahiran hidup yang mana sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 54 per 1.000 kelahiran.

Kematian anak dan bayi dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyertai sejak ibu hamil hingga bayi dilahirkan serta saat anak tersebut menjalani kehidupannya. Berdasarkan SDKI, kematian anak dan bayi mengalami penurunan di setiap kelompok pendidikan ibu, meskipun kematian pada ibu dengan latar belakang pendidikan tinggi jauh lebih rendah dibandingkan ibu dengan pendidikan rendah.

Apabila ditelaah berdasarkan umur ibu saat melahirkan, kematian bayi dan anak lebih banyak ditemukan pada kelompok ibu yang berisiko tinggi dengan umur kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun. Kejadian kematian bayi dan anak semakin meningkat seiring dengan meningkatnya umur ibu di atas 35 tahun.

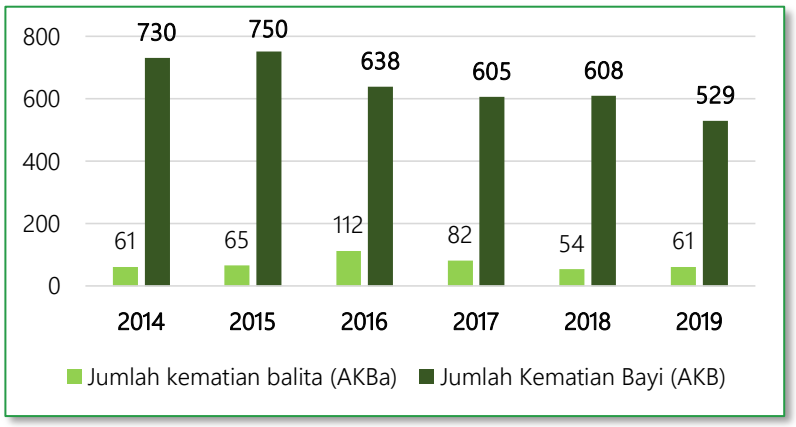

Gambar 02. *Angka Kematian Balita (AKBa) dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup*
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan BPS Provinsi Kaltim, 2020

Kesadaran Kesehatan Reproduksi Cenderung Membaik

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
Nama Indikator	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	11,8* (2017)	11,42		
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	66,5* (2017)	59,5		
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN	%	20,7	21,7	23,3	●
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perem-puan 15-19 tahun	19	18,11	16,7	●
Total Fertility Rate (TFR).	DKP3A, BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,7* (2017)	2,4	2,47	▶

Tingginya angka kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah utama dalam kependudukan. Sejak 2004, program Keluarga Berencana (KB) dinilai berjalan lamban, hingga angka kelahiran mencapai 4,5 juta per tahun dan pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk mencapai 237 juta jiwa. Ledakan penduduk disadari akan berpengaruh pada ketersediaan pangan dan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghindari dampak tersebut, pemerintah berusaha keras menekan angka kelahiran hingga di bawah 237 juta jiwa per tahun.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Selain mengendalikan jumlah penduduk program KB juga bermanfaat untuk mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 seperti yang tercantum dalam Tujuan 3 SDGs.

Tercatat pada Tahun 2019 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern) sebesar

23,3% yang mana lebih tinggi Tahun 2018 yang sebesar 20,7%. Dengan membaiknya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang berdamppak pada membaiknya angka Kelahiran per 1000 perempuan pada usia 15- 19 tahun pada Tahun 2019 yang sebesar 16,17% dan *Total Fertility Rate* yang sebesar 2,47.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kesehatan Ibu dan Anak

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif* (PONEK); 2) peningkatan layanan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi ibu, calon pengantin, serta remaja; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan antenatal dan pengasuhan anak; 4) peningkatan peran masyarakat melalui penguatan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat seperti Desa Siaga, Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi Pencegahan (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi / P4K) dan Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu); dan 5) peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan, termasuk manfaat imunisasi.

Tenaga Kesehatan

Tantangan pemenuhan tenaga kesehatan diantaranya: 1) menempatkan tenaga kesehatan di wilayah DTPK dan tidak diminati; 2) meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan untuk promotif dan preventif seperti tenaga kesehatan masyarakat, gizi dan kesehatan lingkungan; dan 3) meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan epidemiologi dan teknologi Kesehatan.

Kesehatan Reproduksi

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan *reproduksi* terutama bagi anak usia sekolah.

Farmasi dan Alat Kesehatan

Tantangan ke depan adalah: 1) meningkatkan penggunaan obat rasional (POR); 2) memperbaiki sistem *procurement*, penyimpanan dan distribusi terutama untuk DTPK; dan 3) mendorong kemandirian industri farmasi dalam negeri.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka pencapaian target SDGs bidang kesehatan, arah dan kebijakan pada RPJMD 2019-2023 sebagai berikut :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
4. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Dalam percepatan pencapaian Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam SDGS diperlukan berbagai upaya sebagai berikut :

1) Untuk menekan angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita perlu digalakkan Konsep *safe motherhood* yang mencakup serangkaian upaya, praktik, protokol, dan panduan pemberian pelayanan yang didesain untuk memastikan perempuan menerima layanan ginekologis, layanan keluarga berencana, serta layanan *prenatal, delivery*, dan *postpartum* yang berkualitas, dengan tujuan untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan.
2) Untuk meningkatkan kualitas tenaga dan alat Kesehatan adalah sebegai berikut:
   a. Memperkuat kemampuan kepemimpinan *(leadership)* Puskesmas;
   b. Penguatan program Unit Kesehatan Masyarakat
   c. Peningkatan jumlah dan distribusi fasyankes melalui pelibatan aktif peran swasta nasional dan asing
   d. Peningkatan jumlah fasyankes harus diiringi dengan penambahan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas
   e. Penguatan sistem rujukan
   f. Peningkatan kualitas dan mutu layanan fasyankes

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDU-DUK, SUTAS	Jumlah kemati-an ibu	74	90	79	●
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	96,44 (bps 2017)	100	96,39	▶
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,37 (bps 2017)	100	87,34	▶
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	54	77	61	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	498	473		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	608	581	529	●
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes	%	90	80		
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes	API per 1000 penduduk	0,44 (bps 2017)	<1	0,49	●

3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes	Kabupa-ten/ Kota	0 8 (bps 2017)	0		
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	10 7 (bps 2017)	10		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinkes	Provinsi	10	10		
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinkes	Kab/ Kota	1	0		
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinkes	%	25,9	24		
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes	%	39,3	35		
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes	%	28,7	15,4		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinkes	Kab/ Kota	10	10		
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	orang	1083	250		
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	orang	89	120		

3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial	orang	38	45	38	
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/diban tu.	BNN	Lembaga	2	2		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN	%	1,77	2,15		
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	11,8* (2017)	11,42		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	%	66,5* (2017)	59,5		
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN	%	20,7	21,7	23,3	●
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perem-puan 15-19 tahun	19	18,11	16,7	●
3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	DKP3A, BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,7* (2017)	2,4	2,47	●
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							

3.8.1.(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	BPS, Dinkes	%	4,18* (2017)	-	3,85	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS Keseha-tan, Kemenke u	Juta Penduduk	2.680.0 11 (2017)	3.487.807		
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Kesehata n	%	87,19	98		
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS, Dinas Kesehata n	%	24,69* (BPS 2017)	100	24,52	●
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes	%	98,82	100		
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Dinkes	dokter spesialis per 1.000 penduduk	13,89	11		
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinkes	dokter umum per 1.000 penduduk	28,17	45		
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinkes	dokter gigi per 1.000 penduduk	8,41	13		
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinkes	perawat per 1.000 penduduk	218,34	180		
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinkes	perawat gigi per 1.000 penduduk	4,49	18		

	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinkes	bidan per 1.000 penduduk	94,88	120		
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinkes	tenaga gizi per 1.000 penduduk	9,67	14		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinkes	tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	7,56	18		
	Kepadatan dan distribusi tenaga ketarapian fisik	Dinkes	tenaga ketera-pian fisik per 1.000 penduduk	0	5		
	Kepadatan dan distribusiketeknisan medis	Dinkes	tenaga kesehatan masya-rakat per 1.000 penduduk	0	16		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinkes	tenaga ketek-nisian fisik per 1.000 penduduk	10,72	12		

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

I.

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 24 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

Program yang terkait dengan Tujuan 4 antara lain adalah Program Pendidikan Luar Biasa, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan, dan Program Pendidikan Jarak Jauh (*Distance Learning System*). Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh] organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.

II. STATUS CAPAIAN

- Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dasar dan menengah sudah berkualitas dengan tercapainya target sekolah yang terakreditasi di tingkat SD/MI dan SMA/MA.
- Capaian pada indikator proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) meningkat sangat signifikan dari data awal yaitu sebesar 88,87%. Untuk indikator proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) capainnya juga signifikan yaitu 69,44% pada tahun 2019.
- Indikator Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat sekolah dasar dan perguruan tinggi tercapai sehingga menunjukkan kualitas pendidikan yang baik.
- Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun capaiannya sangat baik hingga mencapai 99,03%. Begitu pula dengan indikator Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun, capaiannya juga sangat baik. Hal ini menjamin bahwa kualitas Pendidikan di Kaltim sudah baik.
- Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 di tingkat SD, SMP dan SMA telah mencapai target pada indikator TPB/SDGS. Namun pada peresentase guru yang telah bersertifikat pendidik masih belum seluruhnya tercapai, hanya pada guru tingkat SD/SDLB yaitu sebanyak 87,79%.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	82,1	82,8	●
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	64,45	73,4	●
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Disdik	%	105,39 108,07 (bps 2017)	104,69	101,39	●

Pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa sehingga pendidikan melalui jalur formal perlu ditingkatkan.

Penyelenggaraan pendidikan formal harus dikelola scara profesional oleh orang-orang yang profesional pula agar tercapai mutu pendidikan yang tinggi. Pelaksanaan akredidasi sekolah merupakan cara untuk mengawasi upaya meningkatkan mutu.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar, Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan keputusan Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Kaltim sendiri telah memiliki Badan Akreditasi Provinsi (BAP) untuk Sekolah/Madrasah yang beranggotakan tenaga ahli/kompeten bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan atau bidang keahlian lainnya dan unsur organisai masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen dalam peningkatan mutu pendidikan di Kaltim.

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Disdik	%	27,4	27,8	37,78	

APK Pendidikan Tinggi adalah proporsi anak yang kuliah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia kuliah. Jumlah APK naik berkat program pemerintah dalam pemberian beasiswa hingga pembelajaran jarak jauh (daring). Kaltim pun mengalami kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan tinggi yang terlihat pada indikator TPB/SDGS dengan persentase 37,78%.

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
4.4.1*	Proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% remaja (15-24)	76,99 (bps 2017)	-	88,87	

4.4.1*	Proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% dewasa (15-59)	50,56 (bps 2017)	-	69,44	●

Perkembangan teknologi di Era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana. Secara umum dapat disimpulkan bahwa proporsi remaja (15-24) dan proporsi dewasa (15-59) di Kaltim telah terampil dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Persentasenya adalah sebesar 88,87% proporsi remaja dan 69,44% proporsi dewasa. Angka ini meningkat dari kondisi awal di masing-masing indikator. Kemajuan teknologi dan pengaruh dalam kehidupan remaja dan dewasa adalah hal suatu yang tidak dapat dihindari. Dikarenakan saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi yang telah memengaruhi gaya hidup dan pola pikir.

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio APM SMP/MTs/sederajat	Disdik	%	90,75 100,3 (bps 2017)	92,56	98,1	●
4.5.1*	Rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat	Disdik	%	27,4 96,6 (bps 2017)	27,8	100,85	●
4.5.1*	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Disdik	%	-	-	120,37	●

Dalam Pendidikan, semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas. Angka partisipasi terbagi menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Di Kaltim rasio APM dan APK pada SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/MA/sederajat, dan PT telah tercapai dengan baik pada Tujuan 4 TPB/SDGS.

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas, BPS	%	98,96	-	99,03	●
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	99,92 (bps 2017)	-		
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Susenas, BPS	%	100 99,7 (bps 2017)	-	100	●
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	-	-	99,76	●

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun di Kaltim cenderung tinggi yaitu diatas 99%. Dengan angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kaltim mayoritas telah memiliki kemampuan baca dan tulis, sehingga mengentaskan buta aksara.

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		87,54	87,79	●
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		68,67	72,81	●
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	86,81	86,81	88,84	●

	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	94,58	94,58	95,76	
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	97,58	97,58	98,32	
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	95,05	95,05	95,48	

Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa. Dalam hal ini diperlukan guru yang sesuai dengan klasifikasi sebagai tenaga pendidik yaitu Pendidikan minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi untuk Pendidikan berkualitas anatar lain:

1) Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik kualifikasi S1
2) Masih adanya kekurangan fasilitas pendukung dalam kegiatan belajar mengajar.
3) Distribusi tenaga pendidik yang masih belum merata
4) Masih kurangnya sarana prasarana Pendidikan yang belum memadai

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan dokumen RPJMD Prov Kaltim Tahun 2019-2023, strategi dalam hal Pendidikan adalah peningkatan akses dan mutu Pendidikan, dengan arah kebijakan diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi Pendidikan
4. Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS

5. Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh
7. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa
8. Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak
9. Pengembangan perpustakaan digital

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target TPB/SDGS antara lain:

1. Metode Pembelajaran dengan dasar evaluasi yang mendalam
2. Dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas Pendidikan sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang meamanatkan minimal 20% dari total APBD dialokasijan untuk fungsi pendidikan
3. Pengusulan kurikulum/metode pembelajaran dengan dasar evaluasi yang mendalam
4. Proporsional penganggaran dalam peningkatan kualitas Pendidikan
5. Melakukan Pendataan, sosialisasi dan pembiayaan
6. Memberikan beasiswa atau biaya pendamping bagi guru yang melaksanakan PPG

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Disdik	%	0	67,39	63,4	▶

	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	Disdik	%	0	44,09		
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	82,1	82,8	●
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	78	77,5	▶
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	64,45	73,4	●
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Disdik	%	105,39 108,07 (bps 2017)	104,69	101,39	●
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Disdik	%	105,59 91,46 (bps 2017)	104,26	88,13	▶
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Disdik	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92,56	90,21	▶
`	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Disdik	Tahun	9,48	9,52	9,63	▶
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Disdik	%	58,26	60,21	32,86	▶
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	Disdik	%	90,75	92,56	90,21	▶
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Disdik	%	27,4	27,8	37,78	●
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							

4.4.1*	Proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% remaja (15-24)	76,99 (bps 2017)	-	88,87	●
4.4.1*	Proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% dewasa (15-59)	50,56 (bps 2017)	-	69,44	●
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				74,87		
4.5.1*	Rasio APM SD/MI/sederajat	Disdik	%	105,59 99,8 (bps 2017)	104,26	100,57	▶
4.5.1*	Rasio APM SMP/MTs/sederajat	Disdik	%	90,75 100,3 (bps 2017)	92,56	98,1	●
4.5.1*	Rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat	Disdik	%	27,4 96,6 (bps 2017)	27,8	100,85	●
4.5.1*	Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Disdik	%	-	-	120,37	●
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas, BPS	%	98,96	-	99,03	●
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Susenas, BPS	%	100 99,7 (bps 2017)	-	100	●

	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	Susenas, BPS	%	-	-	99,76	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Disdik	%	-	-		
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Disdik	%		52,1		
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Disdik	%	SD 0	SD 23,41		
				SMP 0	SMP 30,75		
				SMA/ SMK 0	SMA/SM K 26,46		
				SLB 0	SLB 11,11		
				Kaltim 0	Kaltim 22,93		
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik.	Disdik	%		78,17		
	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		31,34		
	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		87,54	87,79	●
	Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		94,45	94,29	▶
	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76		
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76		
	Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		31,34		
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		68,67	72,81	●

	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		88,87		
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	86,81	86,81	88,84	
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	94,58	94,58	95,76	
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		95,05		
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	97,58	97,58	98,32	
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	95,05	95,05	95,48	

5 KESETARAAN GENDER

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

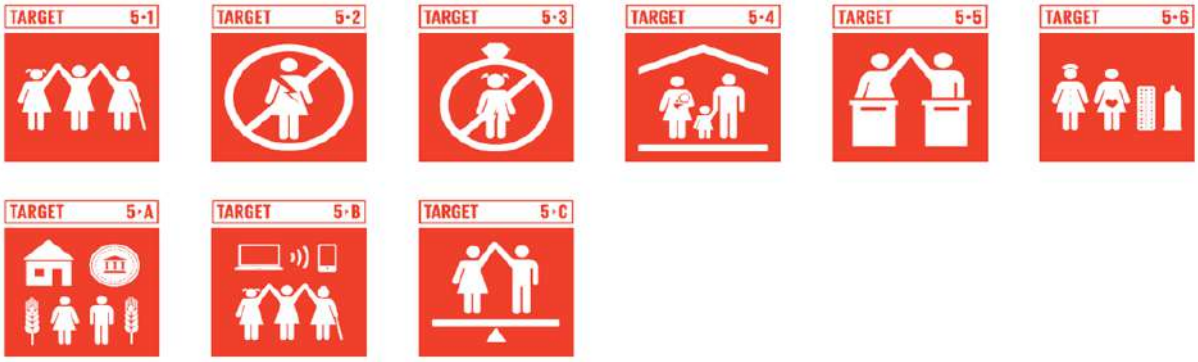

I. PENDAHULUAN

Tujuan 5 TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dengan perbandingan jumlah penduduk yang hampir sama, Perempuan menjadi kelompok yang sangat sulit bertahan dan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan pembangunan agar lebih fokus. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: Program Kesetaraan Gender, dan Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II. STATUS CAPAIAN

- Jumlah kebijakan yang responsive gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan dari target tahun 2019 sebanyak 1 Dokumen

telah tercapai yaitu 1 Dokumen Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019.

- Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun dengan target 21,7 tahun tercapai 44,51 tahun pada 2019
- Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) pada 2019 capaiannya 16,7 kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun.
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
- Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam telah mencapai target pada tahun 2019 yaitu 76,88%.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DKP3A	Doku-men	3	1	1	●

Secara umum, keberhasilan pemberdayaan perempuan didukung oleh adanya dokumen-dokumen yang responsif gender. Salah satu dokumen yang sudah ada berupa kebijakan sebanyak 1 dokumen yaitu Dokumen Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	DKP3A	kelahiran per 1000 perem-puan umur 15-19 tahun	53 (bps 2017)	19	16,7	●

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun juga telah sesuai dengan arah target yang ditetapkan, dimana dari target 18,11 pada tahun 2019 telah tercapai 16,7% dengan kecenderungan selalu mengalami penurunan dari baseline 19 orang per 1000 usia 15-19 tahun.

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DKP3A	%				
			% (pusat)	17,32	20,5	20,87	●
			% (parle-men)	7	9	16,88	●
			% (daerah)	6,722			

Hadirnya representasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Pada Tujuan 5 TPB/SDGS di Kalimantan Timur proporsi kursi yang di duduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah sebanyak 20,87% dan di tingkat parlemen adalah sebanyak 16,88%. Angka ini meningkat dibanding dengan data baseline dan target di tahun 2019.

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS, Diskomin-fo	%	74,3 (bps 2017)	-	76,88	●

Telepon genggam sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan utama di samping pangan, sandang dan papan pada masyarakat modern. Sebagian besar orang didunia pasti tidak terpisahkan lagi dengan yang namanya *Hand phone* dan tidak Memandang dewasa atau remaja penggunanya. Di Kaltim proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam adalah sebesar 76,88%. Dalam kaitannya dengan ekonomi, dengan telepon genggam suatu kegiatan ekonomi baik besar maupun kecil dapat berkembang tidak hanya di suatu wilayah.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 9 Kesetaraan Gender antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas perempuan untuk terus belajar dan mengupgrade kemampuan diri

2. Masih terjadinya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender akibat pelaksanaan pengarusnutamaan gender (PUG) yang belum maksimal
3. Belum tersedianya data terpilah dan akurat tentang kondisi, potensi perempuan dan laki-laki yang dapat menyebabkan rencahnya akses perempuan terhadap pembangunan.
4. Akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana yang belum merata;
5. Kesertaan ber-KB yang masih di dominasi penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek sehingga meningkatkan potensi tingkat putus pakai pemakaian alat dan obat kontrasepsi;
6. Kapasitas dan kapabilitas petugas dalam penyelenggaraan keluarga berencana yang masih harus ditingkatkan;
7. Intensifikasi Advokasi dan Promosi/KIE secara komprehesif oleh seluruh pihak internal maupun eksternal ke potential demand dan sinergitas mekanisme operasional lini lapangan dalam upaya menurunkan angka unmet need;
8. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmetneed antar wilayah;
9. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan yang masih relatif tinggi dan belum optimalnya cakupan serta kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP);
10. Angka kematian Ibu dan bayi yang masih relatif tinggi.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 strategi yang berkaitan dengan kesetaraan gender adalah Optimalisasi pengarusutamaan gender, dengan arah kebijakan berupa:

1. Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat
2. Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian TPB/SDGS pada Tujun 5 diantaranya:

1. Mendorong perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan
2. Melakukan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran berbasis kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

3. Melakukan kajian dalam upaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan daerah
4. Kesempatan 50:50 bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas.
5. Memastikan seluruh faskes yang terdaftar dalam SIM BKKBN mendapatkan distribusi alat/obat kontrasepsi;
6. Meningkatkan kapasitas petugas yang melayani kontrasepsi melalui pelatihan CTU IUD dan Implant;
7. Menyediakan ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB melalui Dana Alokasi Khusus Subbidang KB di Kab/Kota dan APBD;
8. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB;
9. Peningkatan penyebarluasan materi KIE sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
10. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DKP3A	Doku-men	3	1	1	●
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DKP3A	%	116,55	75		
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DKP3A	Tahun	21,7 (bps 2017)	-	44,51	
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR).	DKP3A	kelahiran per 1000 perem-puan umur 15-19	53 (bps 2017)	19	16,7	●

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
			tahun				
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92, 56		
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DKP3A	%				
			% (pusat)	17,32	20,5	20,87	●
			% (parle-men)	7	9	16,88	●
			% (daerah)	6,722			
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DKP3A	%	27	28		
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	10,2 (bps 2017)	9,29		
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	100 (bps 2017)	100		
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS, Diskomin-fo	%	74,3 (bps 2017)	-	76,88	●

6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

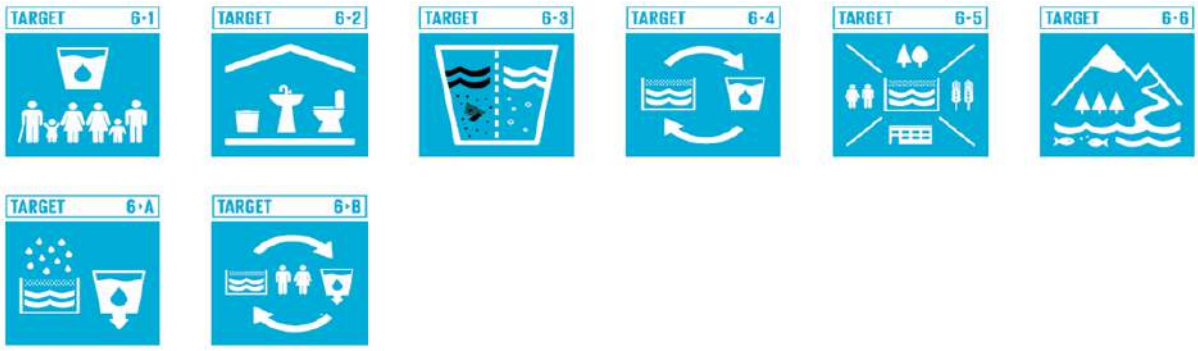

I. PENDAHULUAN

Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 6 (enam) target yaitu: (1) Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau; (2) Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata; (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; (5) Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu; dan (6) Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air.

II. STATUS CAPAIAN

- Pada tahun 2019, sebesar 70,71 persen rumah tangga di Kalimantan Timur telah memiliki cakupan air minum layak. Sementara itu, untuk baseline jaringan air minum perpipaan (JP) sebesar 67,8 persen dan baseline air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) sebesar 2,52 persen pada tahun 2019.

- Realisasi capaian terhadap cakupan sanitasi air limbah layak sebesar 80,89 persen dan cakupan sanitasi air limbah aman sebesar 3,84 persen pada tahun 2019.
- Dalam upaya meningkatkan kualitas air baku, Pemerintah telah berupaya dalam mencegah pencemaran air baku akibat dari pembuangan air limbah (domestik dan industri) ke badan air penerima. Dalam hal mencegah pencemaran air baku oleh pencemaran air limbah domestik, pemerintah dibantu swasta telah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang tersebar di 10 Kab/kota dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 7 Kab/Kota. Pembangunan IPALD dan IPLT tersebut kemudian berkontribusi dalam hal pencapaian target akses air limbah aman Provinsi Kalimantan Timur, yakni 3,84 % di tahun 2019.
- Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya penyusunan 4 Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) hingga tahun 2019, yakni pada DAS Mahakam, DAS Karangan, DAS Berau Kelay dan DAS Kendilo.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	69,02 (bps 2017)	-	75,84	●
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	72,36 (bps 2017)	-	80,89 (DPUPR) 89,22 (BPS)	●
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR	Kabupa-ten/Kota (Skala Kota)	0	0	1	●
			Kabupa-ten/Kota (Skala Kawa-san)	0	0	20	●

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
			Kabupa-ten/Kota (Skala Komu-nal)	0	0	154	●
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	3,84	●

Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik. Selama tahun 2014-2018 persentase rumah tangga di Kaltim yang mendapatkan kriteria sanitasi layak cenderung meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa masih terdapat Kabupaten yang tingkat persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak dibawah 50% yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan akses sanitasi layak pada wilayah yang jauh dari perkotaan.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	82,75 (bps 2017)	81,75	70,71 (DPUPR) 81,26 (BPS 2018)	▼
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%		71,33	50,28	▼

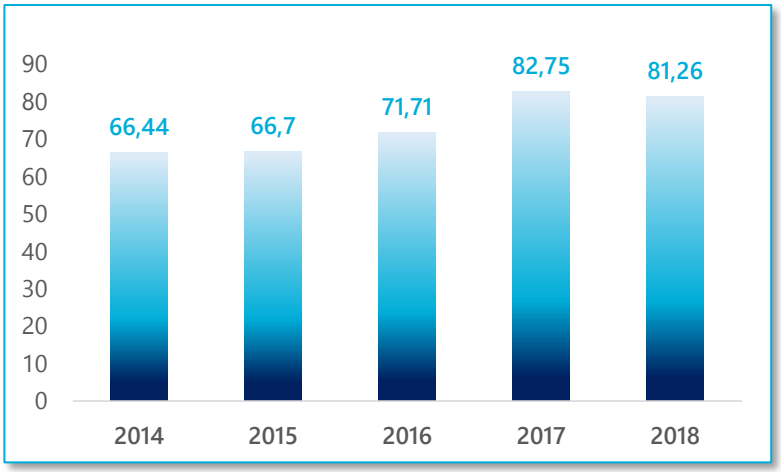

Gambar 01. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Tahun 2015-2018 (Sumber : BPS Kaltim)

Masih minimnya cakupan layanan air bersih perpipaan disebabkan oleh infrastruktur penyediaan air minum yang kurang memadai dan terbatasnya akses layanan air bersih yang menjangkau beberapa kawasan di Kalimantan Timur. Data tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan layanan sumber daya air minum layak menggunakan sumber PDAM, dan oleh karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas penyelenggaraan SPAM. Pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional dibangun untuk meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi kabupaten/kota yang kemudian dikelola dan disalurkan.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak antara lain:

1. Tumpang tindih dan belum optimalnya pembagian wewenang penyelenggaraan SPAM/SPALD/Persampahan di Daerah.
2. Diperlukan SDM yang berkualitas di seluruh pihak (baik di level instansi, pelaksana/pengelola, dan pemberdataan masyarakat) dalam rangka membantu pencapaian akses air minum dan sanitasi.
3. Belum optimalnya pemenuhan akses air minum dan sanitasi di daerah, dengan menyesuaikan kondisi eksisting wilayah (topografi, geografi, dan administrasi).

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait air bersih dan sanitasi layak adalah Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih dengan arah kebijakan meliputi : (1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku dan (2)

Peningkatan infrastruktur layanan air minum. Adapun terkait sanitasi dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat. Selain itu, dalam peningkatan akses layanan air limbah paling efektif ialah memperbanyak pembangunan IPAL Skala layanan Komunal.

Program dan kegiatan mendukung Tujuan 6 antara lain adalah:
1. Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 15 diantaranya:

1. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Air Minum, Air Limbah dan Persampahan.
2. Penyesuaian wewenang penyelenggaraan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan di Daerah.
3. Pembangunan infrastruktur SPAM/SPALD/Persampahan melalui analisa efektif, agar efisien dalam pencapaian target.
4. Memaksimalkan peran PDAM dalam peningkatan kapasitas layanan air minum, penurunan kebocoran (NRW), dan perluasan jaringan layanan air minum.
5. Sosialisasi mengenai kinerja pengelolaan air limbah di IPLT kepada instansi pemerintah, dan sektor komersil.
6. Sosialisasi aktif dan intensif mengenai Program L2T2/L2T3 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	82,75 (bps 2017)	81,75	70,71 (DPUPR) 81,26 (BPS)	▼
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PUPR	m3/dt		7,922	NA	

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%		71,33	50,28	▼
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	69,02 (bps 2017)	-	75,84	●
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor BPS, Dinas PUPR	%	72,36 (bps 2017)	-	80,89 (DPUPR) 89,22 (BPS)	●
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPMPD dan Dinkes	desa/ke-lurahan		1038		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR	Kabupa-ten/Kota (Skala Kota)	0	0	1	●
			Kabupa-ten/Kota (Skala Kawa-san)	0	0	20	●
			Kabupa-ten/Kota (Skala Komu-nal)	0	0	154	●
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	3,84	●
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan	Dinas PUPR	Kab/ Kota		6	7	●

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
	Lumpur Tinja (IPLT).						
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	0,17	●
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas PUPR	Danau prioritas		3	3	●
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas PUPR	Sungai		1	2	●
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas PUPR	RPDAST		1	4	●
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi.	PUPR, BMKG	stasiun		50	31	▶
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR	wilayah sungai		1	2	●
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPR	Wilayah sungai		2	2	●
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	lembaga		6	7	●
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Dinas PUPR	DAS		0	2	
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan	Dinas PUPR	DAS		2	2	●

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
	embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.						
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau							
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	●
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas PUPR	Danau		3	3	●
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	●
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dishut	Ha	3.070	2.226		
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas PUPR	DAS Prioritas		2	2	●

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

I. PENDAHULUAN

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang strategis dan masih tetap menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Selain itu sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang bersih dan juga terjangkau, pendorong aktifi tas ekonomi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam energi dan mineral

.

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 7 adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Untuk memastikan terwujudnya energi bersih dan terjangkau, perlu dipastikan pencapaian 3 target dan 6 indikator yang telah ditetapkan. 3 target yang dimaksud adalah: (1) Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern; (2) Meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global; dan (3) Perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

II. STATUS CAPAIAN

- Rasio elektrifikasi di Kaltim terus mengalami peningkatan dari 75,90 persen di tahun 2014 menjadi 88,93 persen pada tahun 2019. Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada sehingga tercatat secara produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimtara mengalami surplus pada tahun 2018 sebesar 200 MW.

- Berdasarkan permodelan LEAP, bauran energi primer di Provinsi Kaltim tahun 2015 yang paling besar adalah minyak bumi yaitu 67,71 persen dari seluruh sumber energi yang digunakan. Sementara itu bauran energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil di Provinsi Kaltim yaitu hanya 3,13 persen. Pada tahun 2019, bauran energi terbarukan meningkat menjadi 4,48 persen.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	%	85,75	85,5	88,93	●
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	1,86	3,38	4,48	●

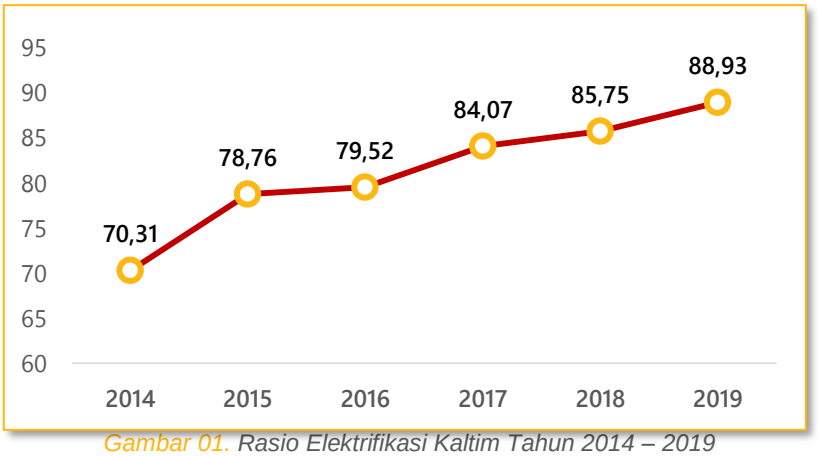

Gambar 01. Rasio Elektrifikasi Kaltim Tahun 2014 – 2019

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi

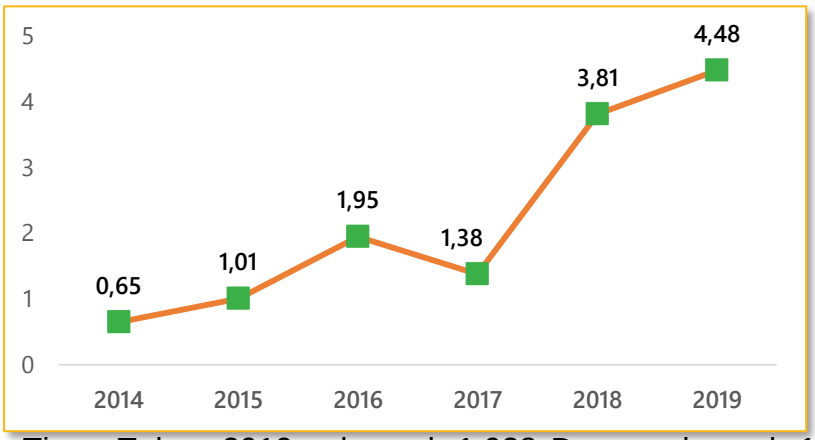

Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Sehingga rasio desa berlistrik mengalami peningkatkan dari tahun 2018 sebesar 98,94% menjadi 99,13% di tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 85,75% pada tahun 2018 menjadi 88,93% pada tahun 2019.

Gambar 02. Bauran Energi Terbarukan Tahun 2014 – 2019

Bauran energi daerah dari sumber energi terbarukan yang berbasis pada bahan bakar nabati yang berupa biodiesel dan bioethanol serta biogas merupakan konsep dan strategi yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kemandirian energi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bauran energi terbarukan Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan di tahun 2017 dan Kembali meningkat sampai tahun 2019 yakni sebesar 4,48%.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan faktor luas wilayah; (2) Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama untuk penyaluran tenaga listrik dari sistem borneo ke daerah *isolated*; dan (3) Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait energi bersih dan terjangkau adalah peningkatan akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal dengan arah kebijakan Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT).

Program dan kegiatan mendukung Tujuan 7 antara lain adalah:

1. Program Pengembangan Ketenagalistrikan
2. Program Diversifikasi Energi
3. Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 7 diantaranya:

1. Mendorong PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya Listrik Perdesaan dengan cara diantaranya peningkatan penganggaran dari Pemerintah Pusat selaku Pembina Usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero).
2. Memberi bantuan pemasangan listrik yang bersumber dari PLN melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat perusahaan pertambangan.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	%	85,75	85,5	88,93	●
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM	kWh	-	-	1.011,92	
7.1.2(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	Dinas ESDM	SR	49,062	54,062	39.670	▼
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas ESDM	%	4,3951	4,6799	NA	
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	1,86	3,38	4,48	●
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan sarana untuk mendorong Kalimantan Timur lebih mandiri dan sejahtera. Kondisi ini perlu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak sehingga tercapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah diupayakan untuk memastikan peningkatan nilai tambah berbagai sektor, akselerasi penyerapan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja layak, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta akses terhadap layanan keuangan.

TARGET	DESKRIPSI
Target 8.1	1. Laju pertumbuhan PDB perkapita 2. PDB Perkapita
Target 8.3	3. Proporsi lapangan kerja informal di sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin; 4. Persentase tenaga kerja formal; 5. Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian.
Target 8.5	6. Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; 7. Persentase setengah pengangguran
Target 8.9	8. Proporsi kontribusi Pariwisata terhadap PDB; 9. Jumlah wisatawan mancanegara; 10. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

II. STATUS CAPAIAN

PDRB Kalimantan Timur sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian memang masih belum stabil. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim secara nasional memang masih rendah (nasional 5,02%). Namun jika melihat tren laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun (4,77% di tahun 2019), hal ini menandakan ekonomi Kaltim bergerak secara dinamis ke arah peningkatan.

Gambar 01. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2019

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian yang inklusif dan bekelanjutan yang memiliki *multiplier effect* besar bagi masyarakat mengalami kemajuan yang baik. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya minat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Kaltim pada tahun 2019 meningkat sebesar 21,75 persen dibandingkan pada tahun 2018.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Timur

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (sakernas),Disnaker	%	6,6	6,2	6,09	●
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,93	0,95	1,02	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Juta Orang	28.000	55.500	76.003	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Juta Orang	1.300.000	5.500.000	7.085.381	

Pada tahun 2019, kondisi ketenagakerjaan Kaltim menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Agustus 2019 mencapai 6,09 persen atau sebanyak 110.574 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2018 yang sebesar 6,60 persen (114.313 orang).
Kontribusi kelompok perempuan dalam kegiatan perekonomian juga semakin besar. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang meningkat di tahun 2019 menjadi 47,41 persen. Sementara itu, sektor perdagangan menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kondisi di atas mampu tercipta dengan semakin intensifnya upaya meningkatkan iklim usaha dan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan, yang pada akhirnya memperluas kesempatan kerja. Reformasi ketenagakerjaan ditempuh terutama melalui kesesuaian pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan upah (*vertical mismatch*) dan kesesuaian kualifikasi pekerjaan dan latar pendidikan (*horizontal mismatch*) agar mendapatkan gambaran aktual dinamika permintaan – penawaran tenaga kerja.

Kinerja dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal dengan indikator kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB Kalimantan Timur tercapai sebesar 1,02 % atau dengan capaian 107,37 dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi PDRB Pariwisata untuk sementara dihitung melalui penyediaan jasa akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 6.637,39 Milyar. Adapun total kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 653.677,10 Milyar.

Begitu pula dengan realisasi capaian untuk indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, telah melebihi target yang ditentukan. Pengukuran kinerja terhadap sasaran tahun 2019 untuk Jumlah total kunjungan wisman dan wisnus termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, untuk jumlah wisatawan mancanegara, tercatat terealisasi sebanyak 76.003 orang dari target 55.500 orang. Kemudian, untuk jumlah kunjungan wisnus sebanyak 7.085.381 orang dari target 5.500.000 orang atau sebesar 128,83%.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Disnaker	%		1,69	-0,55	▼
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (sakernas),Disnaker	%	32,17	30,5	33,95	▼
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (sakernas),Disnaker	%	59,91	62,9	59,18	▼
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (sakernas),Disnaker	%	69,02	68,32	70,60	▼
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (sakernas),Disnaker	%	4,22	3.7	4,82	▼

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Meskipun ekonomi Kaltim menunjukkan tren meningkat namun perekonomian Kaltim dalam hal peningkatan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya masih belum menunjukkan hal baik. Capaian laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun mengalami kontraksi sebesar 0,55 persen, menurun jauh di bawah target sebesar 1,69 persen.

Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja di Kaltim. Jumlah penduduk yang bekerja mayoritas pada tahun 2019 masih merupakan lulusan SMA/SMK, yakni sebesar 40 persen, kemudian disusul lulusan dari SD sebesar 27 persen. Sedangkan yang merupakan lulusan perguruan tinggi hanya sebesar 17 persen dari total jumlah penduduk bekerja. Selain itu, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penciptaan tenaga kerja yang layak serta peningkatan inovasi dan kreasi tenaga kerja yang tidak mencapai target. Diperlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah untuk melakukan pemerataan dan inklusifitas agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada sektor primer dan konvensional.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak antara lain:

1. Di tingkat global, pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif rendah masih akan menjadi pemicu pertumbuhan volume perdagangan yang melambat. Selain itu, harga komoditas internasional yang cenderung stagnan juga berdampak pada kinerja ekspor komoditas Kaltim yang masih bertumpu pada migas dan batubara. Selanjutnya, sentimen di pasar keuangan global dan ketidakpastian akhir perang dagang Amerika Serikat- China semakin menekan kinerja eksternal perekonomian Kaltim, terutama dari sisi investasi dan perdagangan.
2. Di tingkat domestik, pertumbuhan ekonomi yang stagnan disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial yang dipicu oleh masih rendahnya tingkat produktivitas, sejalan dengan tidak berjalannya transformasi struktural dalam perekonomian. Selanjutnya, tidak berkembangnya industri pengolahan yang berdampak pada kinerja perdagangan Kaltim. Selain itu, ekspor Kaltim yang masih didominasi oleh komoditas relatif tidak banyak berubah dibandingkan dengan periode 40 tahun yang lalu.
3. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum mampu merespon perkembangan pasar kerja menyebabkan produktivitas dan daya saing Kaltim masih tertinggal dan lambatnya penciptaan lapangan kerja formal.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua, selama lima tahun ke depan, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2020- 2024 yang mencakup antara lain:

1. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat.
2. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis.
4. Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan.
5. Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat.
6. Pemanfaatan anjungan Kaltim sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata kaltim.
7. Optimalisasi peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai organisasi perangkat daerah memiliki program dan kegiatan yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berikut ini adalah program dan kegiatan tersebut:

1. Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
2. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
3. Program pengembangan destinasi pariwisata
4. Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
5. Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
6. Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB, organisasi non pemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB. Beberapa program dan kegiatan organisasi non-pemerintah tersebut, antara lain: Pembinaan seni budaya di akar rumput melalui pengabdian pada masyarakat, pengembangan dan pelestarian seni budaya, serta pengembangan desa wisata.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SGDs

Lapangan kerja dan pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan daya saing sumber daya manusia yang ditentukan dari tingkat Pendidikan. Tingginya persentase pendidikan dari tingkat pendidikan dari SLTP dan SD mencerminkan bahwa daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur perlu ditingkatkan. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal utama yang dilakukan adalah:

1. Memastikan ketersediaan sarana pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
2. Penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik.
3. Penyediaan tenaga-tenaga terampil
4. Pengembangan Lembaga Pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan industry hilir pengolahan.
5. Peningkatan kualitas Balai Laithan Kerja dengan orientasi industry pertanian dan hasil pertanian dalam asrti luas.

Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui:

1. Optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
2. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.
3. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	0,6* (BPS 2018)		2,72	▶
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	%	174,882 *(BPS 2018)		175,654	▶
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Disnaker	%		1,69	-0,55	▼
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (sakernas),Disnaker	%	32,17	30,5	33,95	▼
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (sakernas),Disnaker	%	59,91	62,9	59,18	▼

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (sakernas),Disnaker	%	69,02	68,32	70,60	▼
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	BI, BPS, Perindag-kop	%	21,31	22,51		Data tdk di bps
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (sakernas),Disnaker	Rupiah		31.880	21.579	▶
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (sakernas),Disnaker	%	6,6	6,2	6,09	●
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (sakernas),Disnaker	%	4,22	3.7	4,82	▼
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (sakernas),Disnaker	%	23,5	21,1	19,44	▶
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya							
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnaker-trans		68	78		
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Pariwisata	%	0,93	0,95	1,02	●
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Juta Orang	28.000	55.500	76.003	●
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Juta Orang	1.300.000	5.500.000	7.085.381	●
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinas Pariwisata,BPS (statistik pariwisa-ta)	Triliun Rupiah	4,962	5	Blum ada data	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total	BPS (Nespar-na), Dispar	%	5,01	5,2	Blum ada data	

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
	pekerja						
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit			108	
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI (data UMKM), Disperin-dagkop	%	26,71	-	19,07	

9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

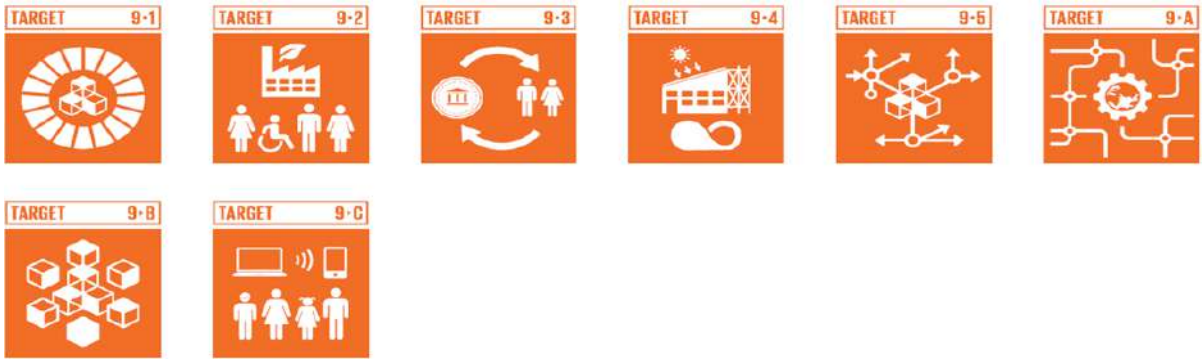

I. PENDAHULUAN

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 6 target pada Tujuan 9 berjumlah 17 indikator.

Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-2023, kebijakan pencapaian Tujuan 9 TPB yang berkaitan dengan peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan, penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah.

Kebijakan untuk mendukung pencapaian Tujuan 9 diarahkan untuk membangun infrastruktur ekonomi, meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi riil dan industrialisasi, memanfaatkan infrastruktur TIK, melaksanakan pembangunan rendah karbon dan meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi.

II. STATUS CAPAIAN

- Capaian pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas yaitu pada indikator Kondisi mantap jalan provinsi dan Panjang pembangunan jalan tol sudah mencapai target.
- Selain jalan, untuk menunjang konektivitas diperlukan bandara, dermaga penyebrangan dan Pelabuhan. Capaian pada target tahun 2019 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada indikator ini telah tercapai 100%.
- Untuk indikator Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Tahun 2019 capainnya melebihi target yaitu 13% dari target 12%.
- Sementara untuk Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita juga masih belum mencapai target
- Dan capaian Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas belum bisa mencapai target, bahkan kondisi tahun 2019 capaiannya minus dimana kondisi ini masih disebabkan oleh pandemi Covid-19.
- Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur masih belum mencapai target, namun Kaltim telah berupaya untuk menurunkan emisi GRK melalui peran *blue carbon.*

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

Percepatan pembangunan Infrastruktur dan konektivitas di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat bisa merata. Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim juga akan berdampak terhadap pesatnya pembangunan infrastruktur. Pemenuhan infrastruktur dan konektivitas merupakan kata kunci yang dapat meimbulkan bangkitan dan tarikan bagi aktivitas perekonomian.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	PUPR	%	52,85	54,3	61,45	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	PUPR	Km	0	99,02	99,02	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	PUPR	Km	-	-	-	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DISHUB	unit	9	9	9	●
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	unit	6	6	6	●

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	lokasi	14	14	14	

Dilihat dari capaian Tujuan 9 indikator infrastruktur dan konektivitas, pencapaian indikator kondisi mantap jalan provinsi sudah baik dan telah melampaui target yaitu sebesar 61,45% dari target tahun 2019 sebesar 54,3%. Untuk capaian panjang pembangunan jalan tol yang merupakan kewenangan Kementerian PUPR juga tercapai sesuai target yaitu pada jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Untuk indikator Jumlah bandara sebagai konektivitas menuju luar daerah adalah sebanyak 9 unit yang tersebar di beberapa Kab/Kota di Kalimantan Timur, bandara yang utama dalam menunjang konektivitas antar daerah dan provinsi di Kalimantan Timur ini adalah Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara APT. Pranoto dan Bandara Kalimarau Berau. Keberadaan bandara akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur. Sektor yang dapat meningkat dengan adanya bandara diantaranya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pariwisata.

Provinsi Kalimantan Timur adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan sungai sehingga perjalanan menuju beberapa Kab/Kota harus ditempuh dengan transportasi air. Hal ini mengharuskan Kaltim memiliki dermaga penyeberangan dimana kondisi saat ini telah tersedia sebanyak 6 unit diantaranya dermaga di Kariangau Balikpapan, Peridan dan Sangkulirang di Kutai Timur, Bontang, PPU, dan Pondong di Kabupaten Paser. Sementara untuk Pelabuhan strategis telah ada sebanyak 14 lokasi yaitu di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar dan Berau. Kondisi Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini dalam kondisi baik serta beroperasi sebagaimana fungsi melayani angkutan penumpang dan barang, namun terhadap dermaga sungai dan penyeberangan perlu dilakukan peningkatan karena kondisi yang dianggap belum maksimal melayani kebutuhan masyarakat terutama kondisi infrastruktur dermaga yang mayoritas masih menggunakan struktur kayu serta kebutuhan fasilitas keselamatan pelayaran.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

Program pembangunan ekonomi Kaltim ke depan dipastikan akan berbasis agroindustri dan juga agribisnis. Dalam menuju visi Kaltim 2030, proporsinya pengembangan sektor industri sebagai basis ekonomi utama sebesar 42 persen pada 2030.

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,							

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Dispe-rindag-kop	%	7,23	7,5	1,42	▼
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	4,06	4,1	-40.7	▼
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	7,94	7,89	7,66	▼
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Perindag-kop	%	100	12	0,99	▼
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta)				
			Persen	21,31	22,51		

Pada indikator Tujuan 9, indikator yang berkaitan dengan sektor industri mengalami kondisi yang kurang baik dan perlu perhatian khusus.

Melihat kontribusi sektor industri pengolahan pada perkonomian Kaltim dalam rangka mendukung tujuan 9 untuk mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan memang masih mengalami kendala, meskipun sektor industri pengolahan merupakan sektor ke-2 terbesar setelah sektor penggalian dan pertambangan dalam PDRB Kaltim, namun jenis industri yang dominan berkontribusi pada sektor ini ialah industri batubara dan pengilangan migas, industri kimia, farmasi dan obat tradisional dan industri makanan. Sehingga, jenis industry pegolahan non migas memang masih belum massif berkembang di Kaltim.

Pada tahun 2019, diketahui terjadi penurunan harga komoditas migas dan harga CPO dan produksi perusahaan industri kimia juga mengalami penurunan yang membuat inidkator pada yang berkaitan dengan sektor industri, yakni Proporsi nilai tambah sektor industri penolahan non migas terhadap PDB dan perkapita serta Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas mengalami capaian yang sangat jauh dari target. Selain itu, pada tahun 2019, juga terjadi kebakaran di kilang minyak RU (*Refinery Unit*) V Balikpapan dan beberapa pabrik pengolahan kayu ada yang menghentikan kegiatan produksinya dikarenakan permintaan produk *plywood* di luar negeri yang melemah terutama dari negara tujuan utama Amerika dan Jepang dan adanya kelangkaan pasokan bahan baku. Berlanjutnya ketidakpastian geopolitik di Amerika serta penurunan kebutuhan kayu lapis di Jepang

membuat sektor industri pengolahan kayu lapis mengalami kontraksi di tengah harga yang kian mengalami penurunan.

Industri pengolahan pupuk juga turut mengalami perlambatan karena rendahnya daya serap pasar domestic dan jenuhnya pasar ekspor

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Target pada Tujuan 9 diantaranya:

1. Masih terdapat kondisi jalan yang belum mantap dikarenakan beban sumbu kendaraan yang melalui jalan provinsi melebihi beban rencana/LHR.
2. Ruas-ruas jalan yang saat ini belum seluruhnya mantap struktur dan geometrik, sehingga mempengaruhi tingkat keamanan, keselamatan dan waktu tempuh perjalanan.
3. Untuk pembangunan jalan tol merupakan kewenangan Kementerian PUPR.
4. Untuk pembangunan bandara dan pelabuhan laut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.
5. Terjadi pembaharuan regulasi dan nomenklatur.
6. Kontribusi sektor industri pengolahan non migas yang didukung dengan integrasi proses hulu-hilir antar sektor dirasaka masih belum optimal, masing-masing sektor masih berjalan mandiri dan integrasi yang ada belum mendongkrak kinerja sektor industry pengolahan
7. Lambatnya pertumbuhan investasi IKM juga menjadi salah satu sebab belum berkembangnya diversifikasi industry pengolahan hasil hutan kayu dan industry hilir pertanian dalam arti luas di Kaltim yang belum banyak bertumbuh
8. Integrasi Pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industry dan sektor ekonomi lainnya juga masih diraskan belum optimal sehingga kemampuan penguasaaan dan kepemilikan teknologi masih terbatas.
9. Masih sedikitnya jumlah tenaga kerja yang lulusan dari perguruan tinggi untuk penduduk yang bekerja di sektor industry menunjukkan masih kurangnya daya saing SDM Kaltim dalam sektor industry pengolahan yang membutuhkan SDM kompeten dan memiliki skil tinggi.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut adalah Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan. Sedangkan arah kebijakan yang selaras di antaranya:

1. Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran

2. Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan
3. Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan
4. Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan
5. Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dilaksanakan dengan baik akan mempermudah aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, salah satunya adalah dalam rangka peningkatan sektor perindustrian dalam perekonomian daerah. Pada sektor industri pengolahan, yang terkait dengan peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah, tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018-2023, sasaran pembangunan sektor industri pengolahan ialah meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah, dengan strategi pada :
Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan

1. Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas
2. Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor

Infrastruktur dan aktivitas ekonomi Kalimantan Timur juga didukung oleh capaian TIK dalam upaya terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan strategi peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan public yang berbasis elektronik/teknologi informasi. Arah kebijakannya berupa peningkatan tatakelola pemerintah yang baik serta peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 9 adalah Pengalokasian dana setiap tahun untuk tercapainya kondisi mantap jalan di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2020 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RPJMD Kaltim yang sedang berjalan, dimana fokus program kegiatan pemerintah disiratkan dalam tema RKPD 2020 “Pengembangan kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi, dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi. Peningkatan industri menjadi fokus utama pada rencana pembangunan selanjutnya di tahun 2021 dengan mengangkat tema RKPD 2021 “Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang mana tema ini juga menyelaraskan pada tema RKP 2021 pemerintah pusat yang fokus pada peningkatan industri, pariwisata, dan investasi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dalam upaya transformasi ekonomi di Kaltim, Sektor industri merupakan fokus utama dalam pengembangan ekonomi, dimana kawasan

strategis provinsi yang ada, yakni KEK MBTK, KIK dan Buluminung, Industri Perkayuan, Perkapalan, dan Jasa di Samarinda, serta Kawasan Strategi Pariwisata Derawan dan Sekitarnya diharapkan menjadi generator pada peningkatan kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB di Kaltim.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	PUPR	%	52,85	54,3	61,45	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	PUPR	Km	0	99,02	99,02	●
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	PUPR	Km	-	-	-	
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DISHUB	unit	9	9	9	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	unit	6	6	6	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	lokasi	14	14	14	●
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Dispe-rindag-kop	%	7,23	7,5	1,42	▼
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	4,06	4,1	-40.7	▼
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Perindag-kop	%	7,94	7,89	7,66	▼
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Perindag-kop	%	100	12	0,99	▼
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta)				
			Persen	21,31	22,51		
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara							

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Perindag-kop	%	52,02	51		
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH	%	7,2	26,3		
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BALIT-BANGDA)	%	0,0000059 (Berda-sarkan PDRB ADHB 2018)	0,0000074		
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband.*	Diskomin-fo	%	90,91	92		
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskomin-fo	%	77,14	80		
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Diskomin-fo	%	59,43	60		

10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Mengurangi Kesenjangan Intra- dan AntarNegara

I. PENDAHULUAN

Penurunan kesenjangan menjadi salah satu fokus pembangunan pada RPJMD Kalimantan Timur 2015- 2019, untuk memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh semua, khususnya kelompok rentan. pemerataan pembangunan perlu terus diupayakan agar terjadi inklusi sosial, ekonomi dan politik, serta kesempatan yang sama untuk semua. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif, perlu dipastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan.

TARGET	DESKRIPSI
Target 10.1	1. Rasio gini 2. Angka kemiskinan 3. Jumlah daerah tertinggal 4. Jumlah desa mandiri 5. Jumlah desa tertinggal 6. Rata-rata pertumbuhan di daerah tertinggal 7. Presentasi penduduk miskin di daerah tertinggal
Target 10.2	8. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
Target 10.3	9. Indeks kebebasan sipil; 10. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.

Target 10.4	11. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah; 12. roporsi peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan;

Pembangunan yang inklusif telah diupayakan dengan menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan, melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, serta menurunkan kesenjangan antarwilayah, melalui penguatan konektivitas.

II. STATUS CAPAIAN

- Tujuan 10 pada tujan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada mengurangi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan skala Gini Ratio yang berkisar antara 0 – 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada Maret 2019, Gini Rasio Kaltim tercatat sebesar 0,33 lebih rendah dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 0,342, dimana distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,24 persen, naik 0,55 poin dibandingkan Angka September 2018 (19,69%). Namun angka ini masih masuk dalam kategori Ketimpangan Rendah.
- Pengurangan kesenjangan dengan mengentaskan jumlah daerah yang tertinggal pada tahun 2019 memang baru mencapai 2 desa dari 4 desa yang ditargetkan, namun melihat perkembangan, pada tahun 2020 target realisasi ini akan tecapai sehingga akan tidak ada daerah tertinggal di Kaltim berdasarkan Indeks Desa Membangun dan akan meningkat statusnya menjadi Desa Berkembang atau Maju begitu pula dengan perkembangan yang ada pada Desa Mandiri.
- Terkait aspek kebebasan sipil, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur sebesar 77.76. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kalimanta Timur 2018 yang capaiannya sebesar 73,88 meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam Katagori sedang.
- Perubahan angka IDI Kalimantan Timur dari 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Capain IDI terendah dialami pada tahun 2011 sebesar 66,37 sedangkan capaian tertinggi pada 2015 sebesar 81,24. Meskipun dari 2015 ke 2016 mengalami penurunan, tetapi perkembangan dari 2016 hingga 2019 menunjukkan trend meningkat.
- Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai suatu

alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,342 (Sep-tember)	0,33	0,33	●
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	DPMPD	desa	518	503	503	●
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DPMPD	desa	2	10	11	●
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, Bappeda	%	3,5 ± 1	3,5 ± 1	5,44	●
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kemen-kumham	Kebija-kan/ Doku-men	-	387	390	●

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Dalam program dan kegiatan mengentaskan jumlah desa tertinggal memang memiliki tantangan tersendiri untuk wilayah Kaltim, dimana kondisi geografis wilayah administrasi desa di Kaltim, terutama yang merupakan kategori desa/kampung tertinggal dan sangat tertinggal sangat sulit dijangkau sehingga memang perlu perhatian lebih dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatannya. Kemudian masih belum optimalnya koordinasi dan pembinaan di level Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pendampingan Desa.

Terkait indeks kebebasan sipil yang menggunakan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Kaltim menunjukkan peningkatan meskipun masih dalam kategori sedang. Ada beberapa tantangan

yang dihadapi dalam peningkatan aspek kekebesan sipil ini, antara lain:

1. Belum semua Aparatur memahami apa itu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2. Masih ada 4 Indikator capaian IDI 2019 yang berkategori kurang yakni :
   a. Ancaman Penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
   b. Demokrasi mogok yang bersifat kekerasan
   c. Perda yang merupakan inisiatif Dewan
   d. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
3. Kendala lainnya adalah terkait pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan yang masih belum optimal, contohnya IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur. Namun pemanfaatan IDI belum menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah khusunya di Kalimantan Timur dan masih perlu ditingkatkan. IDI juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah kebijakan mendatang. Salah satunya upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di Kalimantan Timur.

III. ARAH & KEBIJAKAN

Kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pengentasan desa tertinggal ialah dengan memebrikan dukungan kebijakan dan penganggaran pemerintah, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, namun juga oleh Pemerintah Kabupaten.

Arah kebijakan untuk konsolidasi demokrasi terdiri atas penguatan kapasitas lembaga demokrasi, Penguatan kelompok kerja IDI, penguatan partai politik, Penguatan kapasitas DPRD, Penguatan Kapasitas Aparatur Pemda, Penguatan peran masyarakat serta penguatan kualitas komunikasi publik yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Belanja Daerah Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/7570/SJ tanggal 26 September 2018 terkait Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Belanja Daerah Tahun 2020.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Dalam rangka upaya percepatan pengentasan jumlah daerah tertinggal di Kaltim, maka dilakukan penguatan koordinasi dan pembinaan di level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan Instansi

Teknis/Perangkat Daerah terkait dan pendampingan desa.

Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat Provinsi, antara lain operasional untuk memperkuat Pokja IDI pemerintah Provinsi, Penguatan Demokrasi Indonesia. Melalui Penguatan Partai Politik, Penguatan Kapasitas DPRD, Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Penguatan Peran Masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,342 (Sep-tember)	0,33	0,33	●
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dinsos	%	6,03	-	5,94	▶
			(Rp/ kapita/ bulan)	574.704			
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMPD	Kab	4	4	2	▶
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	DPMPD	desa	518	503	503	●
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DPMPD	desa	2	10	11	●
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, Bappeda	%	3,5 ± 1	3,5 ± 1	5,44	●
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD, BAPPEDA	%	11,62	9,8	11,25	▶
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							

10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kesbang-pol	indeks	73,88	-	77,67	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kemen-kumham	Kebija-kan/ Doku-men	-	387	390	●
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETE-NAGA-KERJAAN	Formal	520.496	587.120		

11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

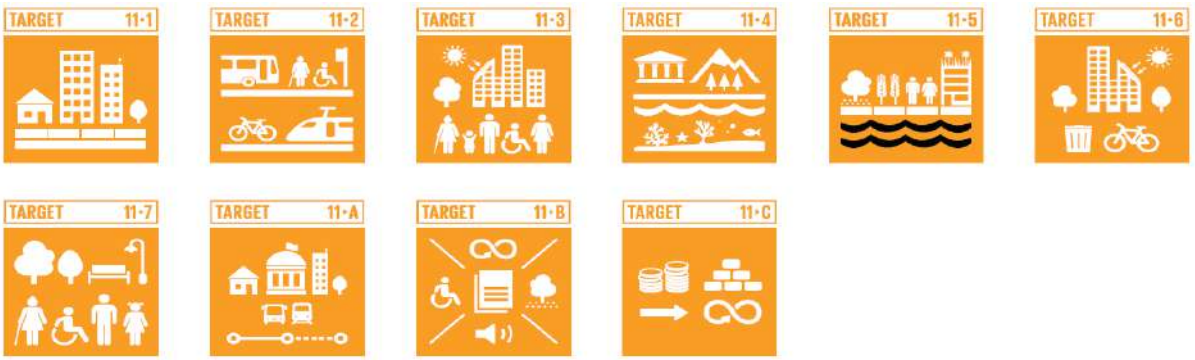

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dalam laporan ini difokuskan Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 TPB seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2019-2023 meliputi:

1. Pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya bagi keluarga pra sejahtera yang berada di kawasan kumuh kewenangan provinsi dengan luas 10-15 Ha.
2. Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

1. Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
4. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Laporan ini juga memuat mengenai tantangan dan kebijakan tahun 2020-2024 sektor di dalam sektor yang terkait dengan Tujuan 11.

II. STATUS CAPAIAN

- Pada Indikator Jumlah Kota Sedang dan Kota Baru yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Baseline (2018) dan 2019 masih berada di angka yang sama yakni 3 Kota.
- Sistem Peringatan Dini yang dipunyai oleh Kaltim masih terbatas di dua (2) kota saja yakni di Samarinda dan Balikpapan.
- Jumlah Kota Hijau yang memiliki Ruang Terbuka Hijau juga masih terbatas pada 3 kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Masih belum terlihat ada upaya untuk membangun Kota Hijau/Kabupaten Hijau yang memiliki Ruang Terbuka Hijau.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN
Standar Pelayanan Perkotaan

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	3	3	3	●

Target jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan atau SPP telah tercapai, yakni Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) masuk dalam PP Perkotaan Pasal 15-16, yakni penyediaan fasilitas pelayanan dalam bentuk SPP yang terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum seperti: air minum; persampahan; permukiman; pemadam kebakaran; energi; sistem transportasi dan logistik; komunikasi dan informasi; ruang publik dan ruang terbuka hijau; keamanan; rekreasi dan pariwisata; dll. Fasilitas Sosial seperti: kesehatan;

pendidikan; perumahan; peribadatan; rumah sosial; perdagangan dan jasa; seni, olahraga; dan pemakaman umum. Semua SPP tersebut disesuaikan dengan besaran dan fungsi kawasan perkotaan.

Kota Pusaka

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka	1	1	1	

Target jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil telah tercapai, yakni Kota Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) memiliki landasan hukum UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri PUPR No.1 tahun 2015 tentang Bangunan GedungCagar Budaya yang dilestarikan. Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bahan penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

Ruang Terbuka Hijau

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PUPR	Kawasan per-kotaan metro-politas/ kota sedang	3	3	3	

Target jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang telah tercapai, yakni Kota Bontang, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Salah satu tolak ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. RTH pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% adalah ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat (menurut UU No.26 Tahun 2007). Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD, (Pusat) INARIS	Indeks	155,49	155,49	155,49	●

Capaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tidak mengalami perubahan yang signifikan dari baseline di tahun 2018. Hal ini disebabkan Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana paling sedikit apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan paling rendah, baik dari ancaman bencana geologi, vulkanologi, hidrometeorologi dan jenis ancaman bencana lainnya. apalagi BNPB menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi gempa di bawah magnitudo 5 yang cenderung tidak merusak dan sedikit kemungkinan memicu gelombang tsunami.

Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini	BPBD	sistem peringa-	7	7	7	●

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
	cuaca dan iklim serta kebencanaan.		tan dini				

Sistem Peringatan Dini (SPD) cuaca dan Iklim serta Kebencanaan yang dimiliki oleh Kalimantan Timur berjumlah 7 buah. Lima buah SPD ditempatkan di Samarinda dalam bentuk *Flood Early Warning System* (FEWS) yakni SPD Banjir dan 2 buah SPD ditempatkan di Balikpapan dalam bentuk Landslide Early Warning System (LEWS) yakni SPD Longsor.

Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	10	20	20	●

Proporsi Pemerintah Kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana baru ada sekitar 20% atau 2 kab/kota, yakni Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kota Samarinda.

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan antara lain :

1. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) baru terbatas pada tiga kota besar di Kalimantan Timur saja, Diperlukan adanya pengembangan kota yang baru mengingat Kalimantan Timur merupakan lokasi IKN yang baru maka kemungkinan terbentuknya kota-kota satelit dengan SPP yang baik sebagai kota penopang IKN merupakan urgensi yang baru.
2. Sistem Peringatan Dini (SPD) Bencana di Kaltim baru dapat mendeteksi bencana banjir dan longsor saja. Diperlukan SPD Bencana lainnya mengingat iklim yang berubah-ubah dan potensi gempa bumi yang tetap ada (≤5 skala richter). SPD Bencana juga hanya ditempatkan di Samarinda dan Balikpapan saja.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, strategi untuk meningkatkan kota dan pemukiman yang berkelanjutan adalah :
2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
   a. Pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya bagi keluarga pra sejahtera yang berada di kawasan kumuh kewenangan provinsi dengan luas 10-15 Ha.
   b. Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
6. Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 ini adalah :

1. Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN) di tingkat daerah
2. Percepatan Pemenuhan standar Pelayanan Perkotaan (SPP) tidak terbatas pada wilayah kota besar saja demi mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Pengembangan kota pusaka yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
11.1.1.(c).	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	3	3	3	●
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak,							

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	75,9	78,5		
11.2.1.(b).	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Kota besar	0	0	0	
11.3.2.(a).	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	PM	1	2		
11.3.2.(b).	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	PUPR (Koordi-nasi SATKER)	PM	-	-		
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka	1	1	1	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	0,03	0	0	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD, (Pusat) INARIS	Indeks	155,49	155,49	155,49	
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD, INARIS, BMKG	Kota Tang-guh	1	1		
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	sistem peringa-tan dini	7	7	7	
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	60,85	61	65,33	
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.1.(a).	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau	PUPR	Kawasa n per-kotaan	3	3	3	

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
	di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		metro-politas/ kota sedang				
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	10	20	20	
11.b.2*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Doku-men	1	3		

12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

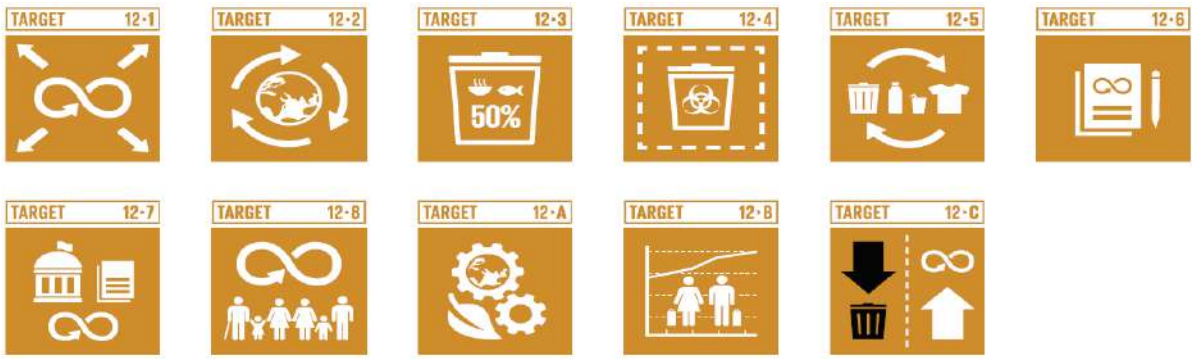

I. PENDAHULUAN

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator.

Kebijakan Tujuan 12 adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: pemanfaatan POME, *road map waste management*, perkebunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

II. STATUS CAPAIAN

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	peserta proper	196	180	205 (emas, hijau, biru)	●

Kinerja Perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang mencapai ranking minimal ranking biru mencapai total 205 perusahaan, yang terdiri dari : peringkat emas 8 perusahaan; peringkat hijau 73 perusahaan; peringkat biru 124 perusahaan. Kinerja ini dinilai melalui kegiatan pemantauan kualitas udara ambien. (LAKIP Dinas Lingkungan Hidup, 2019)

III. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDG

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 ini adalah :

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya dan mengurangi limbah B3;
3. Pengembangan standar produk ramah lingkungan;
4. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

5. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	peserta proper	196	180	205 (emas, hijau, biru)	●

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	juta ton	3.867,47	11.000		
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Juta ton	10	11		

13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

I. PENDAHULUAN

Tujuan 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan dalam rangka mendukung Tujuan 13 TPB, Pengendalian Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, telah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, diantaranya adalah:, pengembangan kebun rakyat di lahan cadangan karbon rendah melalui kemitraan, pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dipetakan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait, atau dokumen lain yang relevan.

II. STATUS CAPAIAN

- Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengukuran penurunan emisi gas rumah dengan kegiatan pelaporan dan evaluasi (MRV) Rencana Aksi Daerah-GRK dan minimal menghasilkan 1 laporan.

- Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tidak mecapai target yang diinginkan sebab banyak daerah di Kaltim yang tidak membuat dokumen strategi yang baru.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Doku-men	1	1	1	●

Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK**,** dengan target kinerja penyusunan Laporan PEP MRV RAD-GRK sebanyak 1 laporan, dan hasil kinerja telah disusunnya laporan PEP MRV RAD-GRK. (LAKIP Dinas Lingkungan Hidup, 2019)

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Doku-men	10	10	2	▼

Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah

Capaian Indikator ini mengalami penurunan yang signifikan, dari target yang ditetapkan hanya 2 Kab/Kota yang masih memiliki Dokumen Strategi PRB yang masih berlaku, yakni Kota Balikpapan (2017-2021) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (2018-2022).

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim antara lain :

1. Dokumen Strategi PRB yang masih berlaku hanya ada di dua Kabupaten/Kota. Di Kota Samarinda sendiri sebagai Ibukota Provinsi, Strategi PRB yang berlaku hanya sampai dengan 2017 saja (2013-2017). Sementara untuk tingkat Kaltim sendiri hanya berlaku sampai dengan 2016. Padahal Samarinda sebagai Ibukota Provinsi memiliki potensi risiko bencana yang besar.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, strategi untuk meningkatkan penanganan perubahan iklim adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   a. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
   b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 ini adalah :

1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya;
2. Sosialisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor, terutama yang berhubungan dengan FCPF-CF;
3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK;
5. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK;
6. Pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca;
7. Pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang vital;
8. Sosialisasi RAN-API, pembuatan RAD-API (Rencana Aksi Daerah – Adaptasi Perubahan Iklim) dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Doku-men	10	10	2	▼
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1	0,03	0	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Doku-men	1	1	1	●

14 EKOSISTEM LAUTAN

Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan
Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

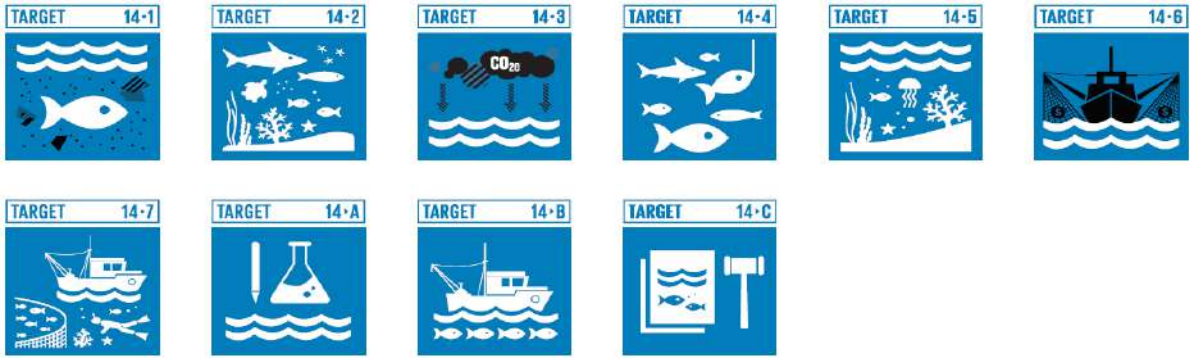

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, Provinsi Kalimantan Timur sangat berkepentingan untuk mencapai target Tujuan 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya Tujuan 14 diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem lautan secara berkelanjutan diantaranya melalui: (1) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrument terkait penataan ruang laut nasional; (2) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) secara berkelanjutan (3) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; dan (4) Jumlah kawasan konservasi perairan; serta (5) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).

II. STATUS CAPAIAN

- Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Dengan penetapan ini, maka pemantauan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai wilayah untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan

pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat dilakukan secara seimbang. Provinsi Kalimantan Timur yang berada di pada 2 WPP yakni pada WPP 713 dan 714 diperkirakan memiliki cadangan produksi perikanan sebesar ±999 ribu Ton Ikan. Dengan jumlah potensi tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada didalamnya guna mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Poros Maritim.

- Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun dengan nilai tidak melebih 80% dari total tangkapan lestari (Maximum Sustainable Yield-MSY). Pada tahun 2019 proporsi tangkapan jenis ikan masih berada pada kisaran nilai 35%, artinya tangkapan jenis ikan masih pada batas biologis yang aman.
- Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan kepatuhan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perizinan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Tercatat pada Tahun 2019, persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mencapai 80% atau melebihi terget yang ditetapkan sebesar 34,27%.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	DKP	Doku-men (PP)	-	-	1	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	2	2	2	●
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							

14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP	% (target dibagi msy)	80	80	35	●
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	HA	322.948,17	290.387,38	288.766	▶
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	33,6	34,27	80	●
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/ kebija-kan	4	3	2	▶
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP	lokasi	8	9	9	●
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3.300	3.561	●
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksana-an UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea)*.	DKP	Pergub	0	0	1	●

Landasan Penataan Ruang Laut Indonesia

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu tujuan dari UU ini adalah melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan kelautan yang mencakup wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut dan tata kelola dan kelembagaan.

Upaya penataan ruang laut terus diupayakan melalui proses yang sistematis termasuk partisipatif, transparansi dan dengan pendekatan berbasis science. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat Provinsi Kalimantan timur juga tengah disusun dan telah masuk pembahasan legislatif di DPRPD Provinsi Kaltim. RZWP3K dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan yang dilakukan melalui: (1) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (4) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia

Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Rencana Pengelolaan Perikanan untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Dengan adanya Rencana Pengelolaan Perikanan pada WPP maka pengaturan pembagian wilayah penangkapan melalui mekanisme perizinan dapat dilakukan, sehingga nelayan secara pasti dapat memanfaatkan sumber daya perikanan secara lestari dan tidak melampaui batasan biologis yang aman.

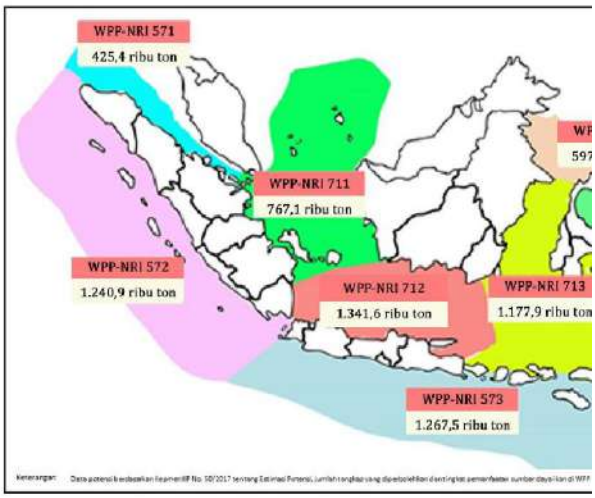

Gambar 01. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

(Sumber: Diolah dari Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor: 50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia)

Tangkapan Jenis Ikan yang Berada Dalam Biologis yang Aman

Selama lebih dari dua dekade, Indonesia menetapkan data tangkapan ikan sesuai (Maximum Sustainable Yield) MSY dengan tingkat tetap sebesar 6,4 juta ton ikan. Dengan telah ditetapkannya WPP, sejak tahun 2011, MSY dapat ditetapkan untuk setiap WPP dan terus diperbaharui dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, MSY ditetapkan sebesar 6,5 juta ton, dan pada tahun 2014 MSY meningkat menjadi 7,3 juta ton. Peningkatan ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, kapal, dan penghitungan spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan data baru tersebut dan didukung penertiban penangkapan perikanan liar, maka estimasi MSY pada tahun 2016 sebesar 9,93 juta ton (Permen KP No. 47/2016). Pada tahun 2017 MSY ditetapkan sebesar 12,54 juta ton (Kepmen KP No 50/2017) yang berasal dari 9 kelompok spesies utama yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang penaeid, ikan karang, lobster, cumi-cumi, kepiting lumpur dan kepiting biru. Dengan data produksi ikan yang ditangkap, diperkirakan capaian produksi Indonesia Tahun 2019 adalah 55,6 persen dan capaian Produksi Provinsi Kaltim sebesar 35% dari MSY dan atau masih di bawah jumlah tangkapan yang lestari yaitu 80 persen.

Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur

Kawasan pesisir dan laut mempunyai sumber daya alam dan ekosistem yang sangat beragam, seperti ekosistem terumbu karang, mangrove dan ekosistem pulau-pulau kecil. Keberadaan ekosistem tersebut mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi pada masa sekarang dan masa depan. Selain fungsi ekonomi sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir, ekosistem pesisir dan laut juga mempunyai fungsi ekologis yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini pencadangan dan Penetapan Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat dilakukan terhadap semua tipe ekosistem, yaitu terhadap satu atau beberapa tipe ekosistem penting untuk dikonservasi berdasarkan kriteria ekologis, sosial budaya dan ekonomis. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Saat ini Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua Kawasan Konservasi Perairan yaitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau seluas 285.548,95 ha yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

87/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim, yang terdiri dari Zona Inti seluas 10.673,55 ha, Zona Pemanfaatan Terbatas seluas 80.757,47 ha dan Zona lainnya seluas 194.117,93 H.

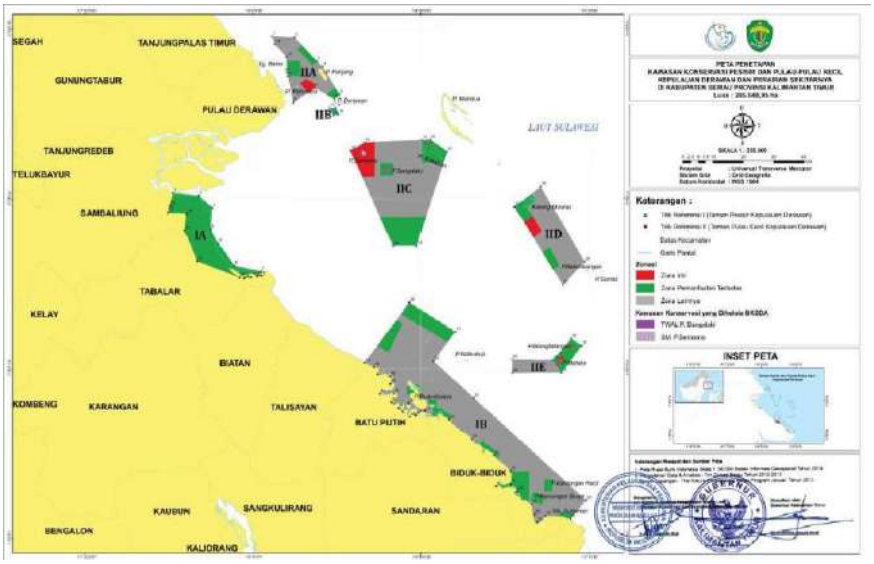

Gambar 02. Peta Penetapan Kawasan Kosnervasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim. (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019)

Kawasan Konservasi Laut lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang seluas ± 5.049,28 ha. Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang saat ini sedang dalam proses peningkatn SK pencadangan oleh Gubernur yang sebelumnya tertuang dalam SK Walikota No. 112 Tahun 2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kota Bontang dan untuk selanjutnya akan diajukan untuk penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Rincian zona pada KKP Bontang adalah: Zona Inti Kedindingan seluas ± 564,24 hadan zona pemanfaatan terbatas beras basah seluas ± 203,66 ha, Zona pemanfaatan Karang Segajah seluas ± 373,97 ha, Zona Pemanfaatan Melahing seluas ± 2.207,41 ha, dan Zona pemanfaatan Tihik-tihik seluas ± 1.700,03 ha.

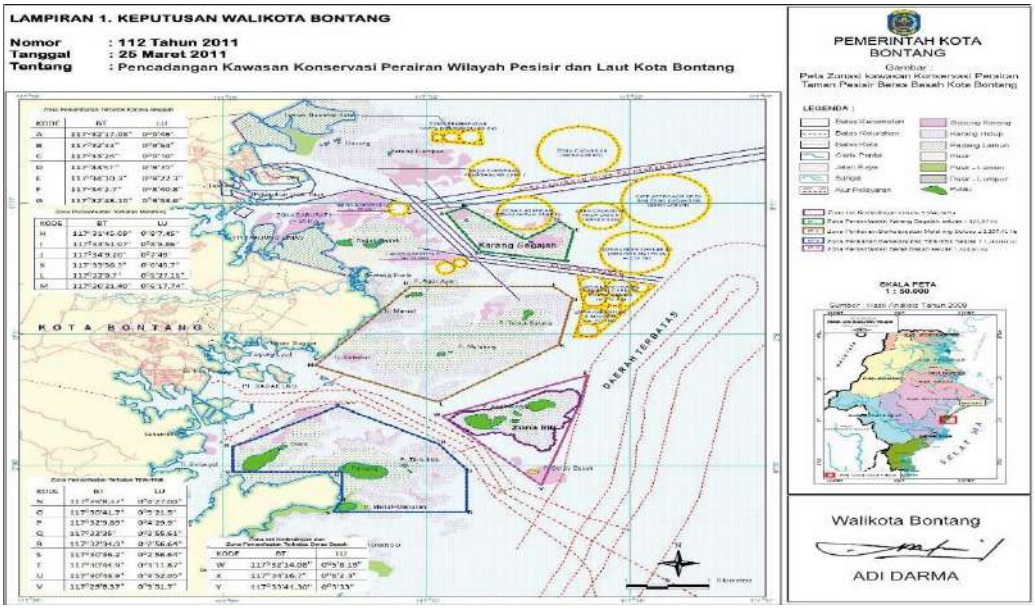

Gambar 03. Peta Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir Beras Basah Kota Bontang
(Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019)

Penanganan *IUU Fishing*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya penanganan *Illegal, Unreported,* dan *Unregulated* (*IUU Fishing*) dan kegiatan perikanan yang merusak baik yang dilakukan kapal perikanan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini diukur melalui kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pada tahun 2019, angka kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mencapai 80% dari target 34,27%. Upaya tersebut didukung dengan operasional kapal pengawas perikanan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan.

Nelayan yang terlindungi dengan Program Asuransi Nelayan.

Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/kebija-kan	4	3	2	
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP	lokasi	8	9	9	
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3.300	3.561	

Seiring dengan penetapan tata ruang dan kawasan, zonasi pesisir dan penetapan Maximum Sustainable Yield (MSY) dan pemanfaatan ekonomi area konservasi secara berkelanjutan, telah dilakukan pula landasan hukum untuk melindungi nelayan kecil. UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil, antara lain: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran;
dan (g) memberikan jaminan

keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Secara operasional, diterbitkan Instruksi Presiden No. 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang menugaskan pada instansi pemerintah terkait untuk membuat program-program yang mengangkat kesejahteraan nelayan kecil, berupa bantuan asuransi, sertifikasi hak atas tanah nelayan, pembentukan koperasi, dan sistem informasi untuk nelayan. Pemberian asuransi nelayan telah mencapai target yang ditetapkan per tahun, namun masih perlu dilakukan peningkatan upaya perlindungan atau pemberian asuransi nelayan sehingga dapat mencakup seluruh nelayan, serta mendorong keberlanjutan upaya perlindungan tersebut secara mandiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Kaltim memberikan perlindungan kepada nelayan Perlindungan terhadap kepada 3.561 nelayan di Kalimantan Timur di 9 Kabupuaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur. Capaian ini sangat meningkat dari tahun sebelumya yang hanya sebanyak 876 nelayan. Adapun bentuk perlindungan kepada nelayan Kaltim berupa bantuan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan , dan sarana penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan

B. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Berbagai tantangan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan, serta upaya mengatasinya antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM pengelolaan data baik perikanan tangkap maupun budidaya, Kurangnya Petugas Pengawas Perikanan yang tersertifikasi;
2. Kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas, belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan data kelautan dan perikanan;
3. Adanya keterbatasan anggaran yang ada, dan adanya pengurangan anggaran pada saat tahun pelaksanaan (tahun berjalan);
4. Perlunya sistem pengelolaan kawasan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan memperhatikan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga membawa dampak keberlangsungan ekosistem lautan;
5. Minimnya sarpras dan SDM untuk operasional pengawasan terhadap IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing dan *Destructive Fishing*;
6. Hubungan ekonomi politik antara komunitas atau masyarakat secara luas yang dapat memengaruhi perubahan terhadap lingkungan;
7. Terjadinya konflik sosial antar nelayan didaerah penangkapan dan pembudidaya.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi serangkaian arah kebijakan telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 sebagai berikut: (1) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, dan (3) peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dilakukan dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 14 yaitu dengan :

1. Penguatan kawasan konservasi kelautan dan perikanan melalui penetapan peraturan (Pergub);
2. Penetapan kawasan kelautan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diperkuat oleh peratusan (Perda);
3. Mengendalikan kegiatan penangkapan ikan untuk keberlangsungan ekosistem perikanan dan memberikan perlindungan asuransi kepada pelaku usaha (Nelayan).

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.							
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	DKP	Doku-men (PP)	-	-	1	●
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	2	2	2	●
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							

14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP	% (target dibagi msy)	80	80	35	●
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	HA	322.948,17	290.387,38	288.766	▶
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	33,6	34,27	80	●
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/ kebija-kan	4	3	2	▶
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/Kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP	lokasi	8	9	9	●
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3.300	3.561	●
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksana-an UNCLOS (*the United Nations Convention on the Law of the Sea)*.	DKP	Pergub	0	0	1	●

15 EKOSISTEM DARATAN

Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

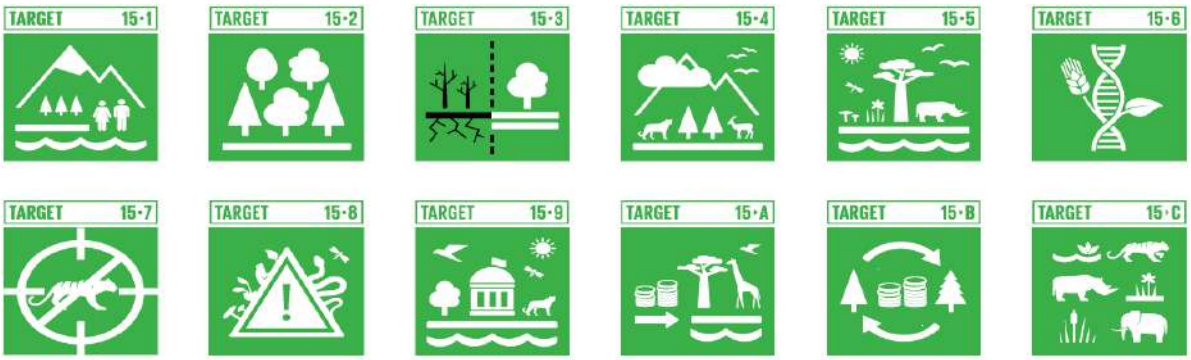

I. PENDAHULUAN

Pencapaian TPB/SDGs Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 5 (lima) target diantaranya: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan; (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis; (4) Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi; dan (5) Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran. Pelaksanaan target-target tersebut diukur melalui 8 (delapan) indikator.

Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 terdiri dari peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kehutanan, pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi, dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah adalah Program

Pengelolaan DAS dan RHL serta Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain: perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan hutan produksi lestari, pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta rehabilitasi dan restorasi hutan.

II. STATUS CAPAIAN

- Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Target proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan yakni 50,56% dan sampai tahun 2019 telah memenuhi target yang ditentukan mencapai 54,9%.
- Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem diperolah dari ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi dalam hutan alam pada hutan produksi (IUPHHK-RE). Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak ada penambahan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sehingga luasan tetap sama sebesar 86.450 Ha.
- Pada tahun 2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70% mengalami peningkatan yakni penambahan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang memperoleh nilai METT sebesar 77%. Nilai METT merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya *(input)*, kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa *(output)* dan dampaknya *(outcame)*.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terbagi dalam tiga kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Sampai dengan tahun 2019 capaian jumlah KPH sebanyak 20 KPH belum mencapai target yang ditentukan. Namun penambahan satu KPH untuk mencapai target dapat dilakukan.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem							

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	%	51,06	50,56	54,90	●
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dishut/ BKSDA Kaltim	unit	2	3	3	●
15.2.1.(d).	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	dishut	Unit	8 + 1	20 + 1	20	▶

Tutupan Hutan dan Lahan

Tutupan hutan dan lahan merupakan indikator utama dalam menentukan tingkat kerusakan hutan dan lahan. Penurunan tutupan hutan dan lahan diantaranya dapat memicu terjadi kelangkaan air dan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh berkurangnya luas habitat spesies. Proporsi tutupan hutan dan lahan……..

Pengelolaan Hutan Lestari

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memberikan banyak nilai manfaat yang tidak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan. Nilai manfaat yang paling optimal akan diperoleh jika hutan dikelola secara lestari. Pengelolaan hutan secara lestari dapat dilakukan melalui pemulihan ekosistem hutan yang terdegradasi dalam kawasan konservasi, pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, peningkatan kawasan konservasi yang mendapat nilai indeks METT minimal 70% dan peningkatan jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem mencapai 86.450 Ha (2019) dan kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% bertambah menjadi 3 unit. Sementara jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tahun 2019 mengalami peningkatan pada masing-masing jenis KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 2, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 17 dan Taman Hutan Raya sebanyak 1.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Tingginya keanekaragaman hayati di Kaltim menuntut sebuah tempat untuk melindungi dan melestarikan keragaman tersebut, diantaranya dalam bentuk

kawasan konservasi. Sampai saat ini jumlah kawasan konservasi seluruh Kaltim sebanyak 9 unit terdiri dari 6 unit yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim: Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Luway, Suaka Margasatwa Pulau Semama dan Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki. Satu unit yang dikelola Balai Taman Nasional Kutai: Taman Nasional Kutai, 1 unit dikelola oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim: Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan 1 unit dikelola oleh UPTD Tahura Lati Petangis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser: Taman Hutan Raya Lati Petangis. Menjaga keberadaan potensi keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistemnya merupakan salah satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi.

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	Ha		0,3	0,00524	▼

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, salah satu penggolongan kualitas lahan di Kawasan lindung dan Kawasan budidaya adalah lahan kritis. Untuk mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam termasuk didalamnya kegiatan reboisasi dan rehabilitasi sebagai upaya penanganan degradasi lahan.

Untuk lahan kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling sedikit berada di Kota Samarinda. Untuk kelas Potensial Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling sedikit berada di Kota Samarinda. Untuk kelas Sangat Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan paling sedikit berada di Kota Balikpapan dan yang terakhir kelas tidak kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan paling sedikit berada di Kota Samarinda.

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan

hidup, seperti *illegal logging,* kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa. Selain itu, lahan kritis masih banyak di Kaltim. Sampai dengan tahun 2019 kelompok lahan kritis seluas 113.015,64 Ha dan kelompok sangat kritis seluas 79.900,55 Ha. Upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan terkendala dengan terbatasnya kewenangan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan hanya di luar Kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait ekosistem daratan adalah pengelolaan Kawasan Hutan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan meliputi:

1. Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
2. Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi.
3. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah antara lain:Program Pengelolaan DAS dan RHL, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain: perhutanan sosial, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Rehabilitasi dan Restorasi Hutan.

IV. UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 15 diantaranya:

1. Meningkatkan aktivitas pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan melalui koordinasi dan sosialisasi.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan RKT.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap pemegang ijin yang berada di dalam wilayah Tahura.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat disekitar Tahura.
5. Mendorong KPH dalam merealisasikan kegiatan sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan dan rencana strategis yang ditetapkan.
6. Mendorong KPH agar melaksanakan kegiatan rahabilitasi lahan sesuai dengan wilayah kerja.

V. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN							
Kode Indikator	**Nama Indikator**	**Sumber Data**	**Satuan**	**Baseline**	**Target (2019)**	**Capaian (2019)**	**Status**
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	%	51,06	50,56	54,90	●
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.2.1.(a).	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	BKSDA, BNKT		9000	10000		
15.2.1.(b).	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	dishut	Ha	86.450	86.450	86.450	●
15.2.1.(c).	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dishut/ BKSDA Kaltim	unit	2	3	3	●
15.2.1.(d).	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	dishut	Unit	8 + 1	20 + 1	20	▶
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	Ha		0,3	0,00524	▼
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara illegal							
15.7.1.(b).	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	BKSDA	spesies	-	2		
Target 15.9 Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran.							
15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dishut, BKSDA	Doku-men	1	1		

16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk Tujuan 16 pada dasarnya merupakan sebuah sudut pandang dalam membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk seluruh pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh. Hal tersebut merupakan sebuah dasar upaya untuk mempercepat kemajuan dari Tujuan TPB/SDGs lainnya serta untuk meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dari prinsip utama TPB/SDGs yaitu *"no one left behind"*. Tanpa adanya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh maka akan sulit mencapai Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs, sehingga Tujuan 16 seringkali disebut dengan istilah tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan lainnya dalam TPB/SDGs *(enabler goals)*.

Tujuan 16 dapat memberikan sebuah kerangka agar pembangunan menjadi perhatian seluruh sektor dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mengatasi ketimpangan. Setidaknya terdapat lima landasan utama dalam menjalankan Tujuan 16 yaitu (i) penyusunan kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang berbasis pada bukti dan data yang bebas dari korupsi dan diskriminasi; (ii) pencatatan sipil yang merangkum seluruh peristiwa lahir, mati, migrasi, kawin dan cerai, tanpa diskriminasi; (iii) mekanisme untuk mencegah, mendeteksi serta menangani kekerasan di dalam masyarakat dan khususnya terhadap anak dan kelompok rentan; (iv) pengadilan yang inklusif dan bantuan hukum yang tersedia hingga di tingkat lokal; dan (v) keterbukaan informasi publik yang mudah diakses seluruh pihak. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan ke dalam 7 target dan 20 indikator dalam TPB/SDGs di Kalimantan Timur, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

TARGET	DESKRIPSI
Target 16.1	1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir 2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk 3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir 4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Target 16.2	5. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir 6. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
Target 16.3	7. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
Target 16.6	8. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 9. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Ka- bupaten/Kota; 10. Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan; 11. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota); 12. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Target 16.7	13. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 14. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II); 15. Indeks Lembaga Demokrasi; 16. Indeks Kebebasan Sipil; 17. Indeks Hak-Hak Politik.
Target 16.9	18. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur; 19. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Target 16.10	20. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 21. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi; 22. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Doku- mentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-un- dangan.

II. STATUS CAPAIAN

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur sebesar 77.67. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kalimantan Timur 2018 yang capaiannya sebesar 73,88 meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam Katagori sedang.
- Perubahan angka IDI Kalimantan Timur dari 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Capain IDI terendah dialami pada tahun 2011 sebesar 66,37 sedangkan capaian tertinggi pada 2015 sebesar 81,24. Meskipun dari 2015 ke 2016 mengalami penurunan, tetapi perkembangan dari 2016 hingga 2019 menunjukkan trend meningkat.
- Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur. IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur.
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-lembaga Demokrasi
- Pada Tahun 2019, dua aspek mengalami kenaikan sedangkan satu aspek mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, Tiga aspek yang diukur pada tahun 2019, indeks aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,89 poin (dari 61,38 naik menjadi 66,27) dan 9,95 poin (dari 72,22 naik menjadi 82,17) dibangdingkan Tahun 2018. Sementara itu nilai indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan 2,49 poin (dari 90,99 turun menjadi 88,50)
- Serupa dengan tahun 2018, pada tahun 2019 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Hak-Hak Politik tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi berada pada kategori “baik”.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DKP3A	%		9,09	18,18	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS, kesbang-pol	indeks	68,72	72,22	82,17	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS, Kesbang-pol	indeks	83,33	90,99	88,5	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	90,3	95	92,69 bps 100,46 dkp3a	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	%	50 % (KIP Kaltim)	60%	75%	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Kominfo	%	94 % (KIP Kaltim)	95%	99%	

16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kominfo	PPID	1	1	1	

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	90,3	95	92,69 bps 100,46 dkp3a	

B. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MASIH MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda, Kesbang-pol	kasus	23	0	12	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	18%	18%	12,7%	

16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS, kesbang-pol	indeks	67,18	61,38	66,27	▼
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS), DKP3A	%	93,552	95	84,83 bps Dkp3a 100,46	▼

C. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

Kendala lainnya adalah terkait pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan yang masih belum optimal, contohnya IDI sebagai suatu alat ukur perkembangan demokrasi yang khas dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi regional. IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di Kalimantan Timur. Namun pemanfaatan IDI belum menjadi dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah khusunya di Kalimantan Timur dan masih perlu ditingkatkan. IDI juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah kebijakan mendatang. salah satunya upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di Kalimantan Timur.

III. KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2019-2023 yang selaras adalah:

1. pengembangan demokrasi di daerah,
2. peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum Pendidikan sebagai muatan lokal.

Adapun Kebijakan dan strategi

1. Konsolidasi Demokrasi.
2. Arah kebijakan untuk konsolidasi demokrasi terdiri atas penguatan kapasitas lembaga demokrasi, Penguatan kelompok kerja IDI, penguatan partai politik, Penguatan kapasitas DPRD, Penguatan Kapasitas Aparatur Pemda, Penguatan peran masyarakat serta penguatan kualitas komunikasi publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Belanja Daerah Tahun 2019
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/7570/SJ tanggal 26 September 2018

terkait Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Belanja Daerah Tahun 2020

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat Provinsi, antara lain operasional untuk memperkuat Pokja IDI pemerintah Provinsi, Penguatan Demokrasi Indonesia. melalui Penguatan Partai Politik, Penguatan Kapasitas DPRD, Penguatan Kapasitas Aparatur Pemda, Penguatan Peran Masyarakat melaui kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan peningkatan pelayanan public melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.

IV. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda, Kesbang-pol	kasus	23	0	12	▼
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda, Kesbang-pol	Kemati-an/ 100.000 pendu-duk	0	0	0	●
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polda, Kesbang-pol	%	1,39 (BPS, 2017)	0	0,08	▶
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	statistik kriminal (BPS)	%	55,42	100		
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	statistik kriminal BPS, DKP3A	%	0	0		

16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DKP3A	%	0,046	0,040		
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DKP3A, BPS	%	11,07	15		
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Biro pemerin-tahan	%	90	90	90	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerin-tahan	%	74,89	77,5	76,55	
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	Biro pemerin-tahan	%	63	64,95		
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota).	Biro pemerin-tahan	%	68,02	69,5	68,6	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							

16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DKP3A	%		9,09	18,18	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	18%	18%	12,7%	
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS, kesbang-pol	indeks	68,72	72,22	82,17	
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS, Kesbang-pol	indeks	83,33	90,99	88,5	
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS, kesbang-pol	indeks	67,18	61,38	66,27	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS), DKP3A	%	93,552	95	84,83 bps Dkp3a 100,46	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	90,3	95	92,69 bps 100,46 dkp3a	
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	%	50 % (KIP Kaltim)	60%	75%	
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	Kominfo	%	94 % (KIP Kaltim)	95%	99%	

16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kominfo	PPID	1	1	1	
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Hukum dan HAM	Kebija-kan/ Doku-men	387	390		

I. PENDAHULUAN

Pembahasan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan difokuskan pada capaian lima (5) isu penting yang mendukung pencapaian ke-16 Tujuan lainnya yakni (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; dan (ii) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (means of implementation) dan upaya merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 12 Target dan 32 indikator TPB/SDGs Kaltim sebagai berikut

TARGET	DESKRIPSI
Target 17.1	1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; 2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; 3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Target 17.6	4. Pers entase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK); 5. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Pedesaan; 6. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.
Target 17.8	7. Proporsi individu yang menggunakan internet; 8. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Target 17.18	9. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik; 10. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama; 11. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa
Target 17.19	12. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register); 13. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website; 14. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS); .

II. STATUS CAPAIAN

- Secara statistik mengalami kecenderungan/tren naik dari target yang telah ditetapkan dan tercapai, menyatakan bahwa meningkatnya Pendapatan Daerah maka upaya pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan terlaksana yang pada akhirnya mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB Masyarakat Kaltim meningkat.
- Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB naik dari 2 tahun sebelumnya dan tercapai menandakan ratio Pajak Daerah mempengaruhi PDRB Kaltim.
- Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.Mengalami tren naik yang sangat signifikan dan tercapai dari target yang ditetapkan hal ini menandakan bahwa peranan proporsi Pajak Domestik mempunyai pengaruh besar terhadap Anggaran dan sarana prasarana Pembangunan, serta Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

- Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Target terkait data statistik di Kaltim menunjukan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data.

A. PENCAPAIAN INDIKATOR TPB/SDGS YANG MENGALAMI KEMAJUAN

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda	%	0,91	0,83	1,00	●
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,74%	0,67	0,76	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	%	75,49%	41,90%	76,82	●

17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	90	90	100	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	82	82	99,02	
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Meta-data	0	5	2	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	85	85	100	

Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Provinsi Kalimantan Timur yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2019 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Provinsi Kalimantan

Timur yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen, dan konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Provinsi Kalimantan Timur, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen. Komitmen BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BPS Provinsi Kalimantan Timur, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengguna (konsumen) data. Sebagian besar konsumen di PST BPS Provinsi Kalimantan Timur menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 99,02 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS

Adapun konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama sebesar 82% pada 2018, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 99,02%. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website mengalami peningkatan sebanyak 1000 orang di tahun 2018 yakni sebesar 52.000 orang jika dilihat dari tahun 2017 yakni hanya sebesar 51.000. Presentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada 2018 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai 100%.

Presentase konsumen yang menggunakan data statistik Tahun 2016-2019

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	90%	90%	90%	100%
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	81%	81%	82%	99,02%
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	51.000	51.000	52.000	
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	82%	82%	85%	100%

A. TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI

1. Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih

mudah (easier), dan lebih berkualitas (better). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam.

2. Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.
3. kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.
4. Upaya bagaimana Meningkatkan pertumbuhan ekonomi/PDRB Kaltim dengan cara meningkatkan Pendapatan daerah
5. Upaya bagaimana Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui pajak Daerah yang berpengaruh pertumbuhan ekonomi
6. Upaya Pemerintah Daerah bagaimana meningkatkan Pajak Daerah dan dialokasikan pada Anggaran Domestik

III. KEBIJAKAN KE DEPAN

Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah:

1. peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam,
2. peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
3. peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi
4. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
5. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS
6. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

IV. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN TPB/SDGS

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target (2019)	Capaian (2019)	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda	%	0,91	0,83	1,00	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,74%	0,67	0,76	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	%	75,49%	41,90%	76,82	
Target 17.6. Meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasarkan kesepakatan timbal balik.							
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Diskomin-fo	%	60	65		
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (*fixed broadband)* di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskomin-fo	%	50,09	51		

17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Diskomi n-fo	%	90,91	92		
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskomi n-fo	%	42,14	60		
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskomi n-fo	%	30	35		
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	90	90	100	
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	82	82	99,02	

17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Meta-data	0	5	2	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*)	DKP3A	data regis-trasi	1	1		
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*.	BPS	Pengun-jung	52.000	52000		
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	85	85	100	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah disepakati 193 negara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. Sebagai negara yang turut menggarap konsep SDGs, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan dan mencapainya pada tahun 2030. Wujud komitmen tersebut, ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Perpres itu menjadi landasan dan payung hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan TPB/SDGs.

Sebanyak 94 target TPB/SDGs telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Selanjutnya target SDGs yang diintegrasikan makin banyak, dari 164 target TPB/SDGs yang relevan sebanyak 124 target telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020 – 2024. Pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs nasional (RAN) dan daerah (RAD).

Perubahan mendasar lainnya yang dibawa TPB adalah prinsip "*no one left behind*, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan". hal ini mengartikan bahwa pembangunan dalam agenda TPB harus memberi manfaat bagi semua lapisan kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu pula, arah tujuan pembangunan berkelanjutan juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara. Pelaksanaan SDGs berlaku secara universal untuk negara–negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Keputusan Gubernur Kaltim No. 050/K.362/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023. Susunan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kaltim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 3 pilar Pembangunan, dan Sekretariat.

PENCAPAIAN TPB/SDGs Tahun 2019

Laporan TPB/SDGs tahun 2019 ini adalah laporan tahunan kinerja TPB/SSGs pertama dari pemantauan dan evaluasi atas kemajuan dan pencapaian TPB/SDGs, yang targetnya telah dicantumkan pada RAD 2019-2023. Laporan tahun 2019 ini dirumuskan untuk memantau serta mengukur kinerja capaian target-target melalui serangkaian indikator TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan pada RAD TPB/SDGs 2019-2023. Laporan ini menampilkan perkembangan capaian dari indikator TPB/SDGs yang dikelompokkan dalam tiga (3) kategori:

1. Indikator yang mengalami kemajuan (ditandai dengan status warna hijau), artinya indikator-indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019;
2. Indikator yang akan tercapai atau membaik (ditandai dengan status warna kuning), yaitu indikator yang mengalami tren peningkatan dari data dasar *(baseline)* namun belum mencapai target tahun 2019;
3. Indikator yang membutuhkan perhatian khusus (ditandai dengan status warna merah), adalah indikator yang trennya menurun dari data dasar (baseline) atau sama sekali tidak mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Proses penyusunan laporan dilakukan secara inklusif dan terbuka dengan melibatkan seluruh platform partisipatif baik dari unsur pemerintah, akademisi, CSO, filantropi dan pelaku usaha juga kaum pemuda, serta melalui konsultasi secara tatap muka *(offline)* maupun secara media virtual *(online)*.

Berikut rekapitulasi indikator berdasarkan pengelompokkan kategori status pencapaian indikator TPB/SDGs untuk setiap pilar pembangunan TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur.

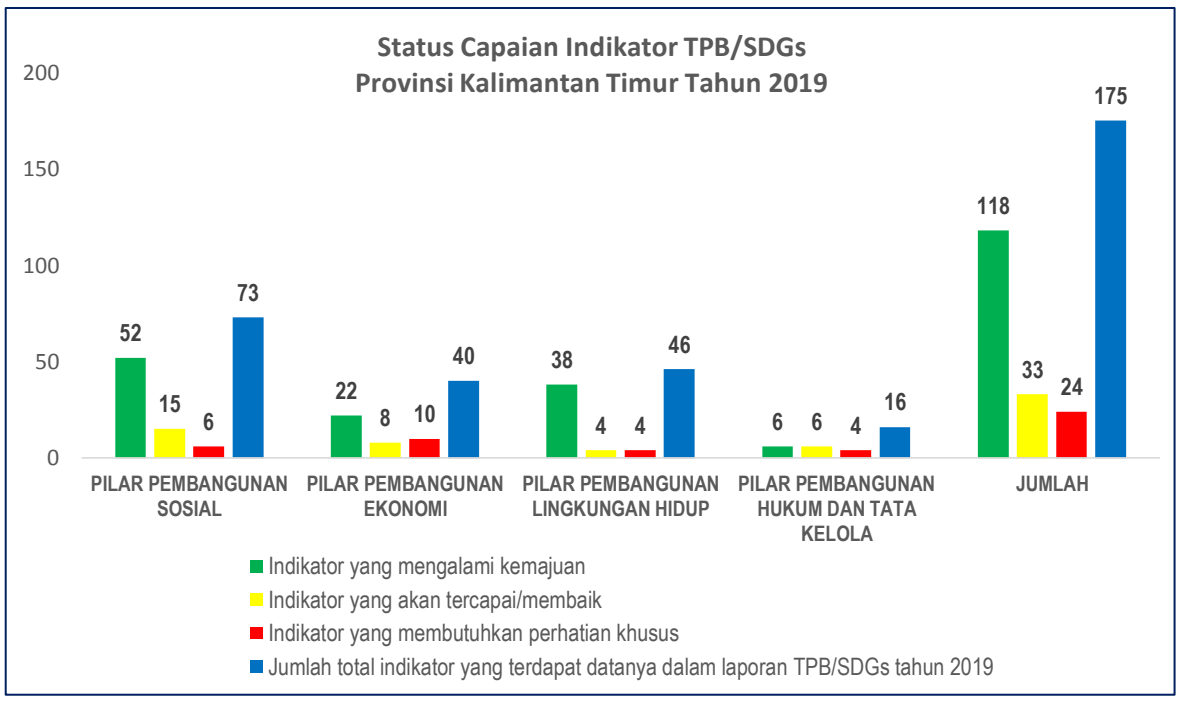

Pada diagram Rekapitulasi Status Indikator TPB/SDGs ini tergambarkan bahwa capaian TPB/SDGs 2019 meliputi 175 indikator yang dianalisa terdapat datanya dan tercantum pada RAD 2019-2023. Sekitar 68 persen atau 118 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada RAD 2019-2023 untuk laporan tahun 2019. Bila ditambahkan 19 persen atau 33 indikator yang menunjukkan tren akan membaik, maka terdapat sekitar 87 persen dari 174 indikator TPB/SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian lebih baik. Akan tetapi, Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam pencapaian target TPB/SDGs khususnya untuk indikator yang memerlukan perhatian khusus yang mencakup sekitar 13 persen atau sebanya 24 indikator.

Berikut ringkasan pencapaian dari setiap Tujuan atas indikator-indikator yang mengalami kemajuan serta indikator yang juga masih menjadi tantangan untuk dihadapi dan harus menjadi perhatian setiap pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk secara bersama-sama mengatasinya.

TUJUAN 1 – TANPA KEMISKINAN

- Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami tren penurunan. Persentase penduduk miskin pada Tahun 2019 sebesar 5,91 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 220.910 orang. Selama Maret 2019 – September 2019, garis kemiskinan naik sebesar 4,85 persen, yaitu dari Rp. 609.155,- per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp. 638.690,- per kapita per bulan pada September 2019. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Jumlah penduduk miskin didaerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan secara persentase, namun mengalami kenaikan secara absolut.
- Selain fokus pada capaian tingkat kemiskinan, upaya mengakhiri kemiskinan juga difokuskan pada akses terhadap pelayanan dasar seperti sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) masih belum mencapai target di Kaltim. Meskipun masih berada di level tengah, yakni peringkat ke-13 di seluruh Provinsi Indonesia. Begitu pula halnya dengan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah) masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat mendaftarakan legalitas identitas keluarganya dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas identitas penduduk.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kaltim ialah dihadapkan pada sulitnya menurunkan angka kemiskinan, di mana hal ini perlu menjadi perhatian terutama bagi tim penanggulan kemiskinan di Kaltim, serta perlunya untuk melihat sebaran penduduk miskin secara faktual untuk menemukan kebijakan yang tepat guna mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama dalam menggali potensi ekonomi masayrakat di kawasan penduduk miskin.

Arah kebijakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan ke depan sesuai dengan RPJMD 2019–2023 diarahkan pada kebijakan utama, yaitu 1) Pengembangan Fasilitasi dan Pendampingan Permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas dan 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam pengurangan risiko bencana.

Upaya mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan dilakukan intervensi kebijakan dengan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan pemukiman yang layak. Disamping itu juga dilakukan dengan memberikan bantuan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat miskin dalam memperoleh permodalan usaha.

TUJUAN 2 – TANPA KELAPARAN

- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* di Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 7,02 persen lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 7,66 persen. Dari capaian indikator PoU tersebut menggambarkan kurang lebih terdapat 254 Ribu Jiwa Penduduk Kaltim yang tidak cukup konsumsi energi dari makanan yang dikonsumsi.
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur cenderung membaik, ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) dari 82,5 (2013) menjadi 85,8 (2019).
- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, meskipun proporsinya masih cukup tinggi yaitu sebesar 21,3 persen atau lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 27,7 persen pada tahun 2019. Untuk dapat memenuhi target nasional terhadap penurunan stunting pada 2024 menjadi 14 persen maka dibutuhkan laju penurunan stunting ditiap tahunnya sebesar 2,96 persen.

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain 1) Konversi lahan pertanian terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; 2) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua *(aging farmer)* dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, dan pasar; 3) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; 4) Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA); 5) Belum optimalnya Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.

Berdasarkan Dokumen RPJMD 2019-2023, arah kebijakan dalam hal mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan penyediaan pangan meliputi 1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T); 2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; 5) Perbaikan penanganan pasca penen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; 6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani; 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian; 8) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering; 9) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 10) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB.

Upaya yang dilakukan dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, gizi yang baik serta pertanian yang berkelanjutan yaitu dengan 1) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 2) Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); 3) Pengembangan Produk Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu dan Hari Pangan Sedunia; 4) Pengawasan dan Sertifikasi Komoditi Pangan Segar; 5) Pembekalan atau peningkatan kapasitas dalam penanggulangan masalah Gizi.

TUJUAN 3 – KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

- Capaian utama dari Tujuan 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera antara lain peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak

menular, peningkatan akses Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB), serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kaltim masih sebesar 79 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

- Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun mencapai target yakni sebesar 16,7 per 1000 kelahiran. Sedangkan angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) hamper mencapai target tahun 2019 yakni sebesar 2,47 anak per WUS (15-49 tahun) dari target 2019 sebesar 2,4 anak per WUS (15-49 tahun).
- Capaian Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Tren penurunan tersebut menunjukkan target Roadmap SDGs tahun 2023 untuk mengurangi AKBa menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB 484 per 1.000 kelahiran hidup diperkirakan dapat tercapai pada tahun 2023. Namun untuk AKBa sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2019 yakni sebesar 61 per 1.000 kelahiran hidup yang mana sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 54 per 1.000 kelahiran.

Dalam mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga Kesehatan, pendidikan peran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan kesehatan.

Dalam rangka pencapaian target SDGs bidang kesehatan, arah dan kebijakan pada RPJMD 2019-2023 adalah 1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil; 2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 4) Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Upaya percepatan pencapaian Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas dan pemerataan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, untuk menekan angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita diperlukan konsep *safe motherhood* untuk menjamin kondisi kesehatan sang ibu, janin, dan anak agar tetap optimal pada saat kehamilan, persalinan, dan pasca-melahirkan.

TUJUAN 4 – PENDIDIKAN BERKUALITAS

- Tingkat pendidikan di Kaltim terbilang cukup baik, dilihat dari tercapainya target sekolah yang terakreditasi di tingkat SD/MI dan SMA/MA serta Indikator APM dan APK pada SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/MA/sederajat, dan Perguruan Tinggi telah tercapai dengan baik.
- Pada tahun 2019, capaian persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun di Kaltim cenderung tinggi yaitu diatas 99 persen. Hal ini menunjukkan masyarakat Kaltim mayoritas telah memiliki kemampuan baca dan tulis sehingga dapat mewujudkan pengentasan buta aksara.
- Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 di tingkat SD, SMP dan SMA telah mencapai target pada indikator TPB/SDGS. Namun pada peresentase guru yang telah bersertifikat pendidik masih belum seluruhnya tercapai, hanya pada guru tingkat SD/SDLB yaitu sebanyak 87,79 persen.

Tantangan untuk mencapai Pendidikan yang berkualitas yang saat ini dihadapi adalah 1) Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik kualifikasi S1; 2) Masih adanya kekurangan fasilitas pendukung dalam kegiatan belajar mengajar; 3) Distribusi tenaga pendidik yang masih belum merata; dan 4) Masih kurangnya sarana prasarana Pendidikan yang belum memadai.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023, strategi dalam hal Pendidikan adalah peningkatan akses dan mutu Pendidikan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, pemenuhan kualifikasi tenaga pendidik, mempercepat wajib belajar 12 tahun, penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin.

Upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target Tujuan 4 TPB/SDGS adalah 1) Metode Pembelajaran dengan dasar evaluasi yang mendalam; 2) Dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas Pendidikan; 3) Pengusulan kurikulum/metode pembelajaran dengan dasar evaluasi yang mendalam; 4) Proporsional penganggaran dalam peningkatan kualitas Pendidikan; 5) Pendataan, sosialisasi dan pembiayaan; 6) Memberikan beasiswa atau biaya pendamping bagi guru yang melaksanakan PPG.

TUJUAN 5 – KESETARAAN GENDER

- Keberhasilan pemberdayaan perempuan didukung oleh adanya dokumen-dokumen yang responsif gender. Salah satu dokumen yang sudah ada berupa kebijakan sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender.
- Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun juga telah sesuai dengan arah target yang ditetapkan, dimana dari target 18,11 pada tahun 2019 telah tercapai 16,7 persen dengan kecenderungan selalu mengalami penurunan dari baseline 19 orang per 1000 usia 15-19 tahun.
- Pada Tujuan 5 TPB/SDGS di Kalimantan Timur proporsi kursi yang di duduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah sebanyak 20,87 persen dan di tingkat parlemen adalah sebanyak 16,88 persen. Angka ini meningkat dibanding dengan data *baseline* dan target di tahun 2019.

Dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Kaltim masih terkendala oleh beberapa tantangan, yakni pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang belum maksimal, belum optimalnya kapasitas perempuan, akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana yang belum merata, tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmet need* antar wilayah, serta persentase kehamilan yang tidak diinginkan yang masih relatif tinggi dan belum optimalnya cakupan serta kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).

Berdasarkan dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 strategi yang berkaitan dengan kesetaraan gender adalah optimalisasi pengarusutamaan gender, dengan arah kebijakan peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat, optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian TPB/SDGS pada Tujuan 5 diantaranya 1) Melakukan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran berbasis kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 2) Kesempatan 50:50 bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas; 3) Menyediakan ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB; 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga; 5) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB; 6) Distribusi alat/obat kontrasepsi dan meningkatkan kapasitas petugas yang melayani kontrasepsi.

TUJUAN 6 – AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

- Pada tahun 2019, sebesar 70,71 persen rumah tangga di Kalimantan Timur telah memiliki cakupan air minum layak. Sementara itu, untuk baseline jaringan air minum perpipaan (JP) sebesar 67,8 persen dan baseline air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) sebesar 2,52 persen pada tahun 2019.
- Pemerintah dan swasta telah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang tersebar di 10 Kab/kota dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 7 Kab/Kota. Pembangunan IPALD dan IPLT tersebut berkontribusi dalam pencapaian target akses air limbah aman Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebesar 3,84 persen di tahun 2019.
- Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di antaranya penyusunan 4 Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) hingga tahun 2019, yakni pada DAS Mahakam, DAS Karangan, DAS Berau Kelay dan DAS Kendilo.

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah tumpang tindih dan belum optimalnya pembagian wewenang penyelenggaraan SPAM/SPALD/Persampahan di Daerah; diperlukan SDM yang berkualitas di seluruh pihak dalam rangka membantu pencapaian akses air minum dan sanitasi; dan belum optimalnya pemenuhan akses air minum dan sanitasi di daerah, dengan menyesuaikan kondisi eksisting wilayah.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait air bersih dan sanitasi layak adalah Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih dengan arah kebijakan meliputi peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku dan peningkatan infrastruktur layanan air minum. Adapun terkait sanitasi dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat. Selain itu, dalam peningkatan akses layanan air limbah paling efektif ialah memperbanyak pembangunan IPAL Skala layanan Komunal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 15 diantaranya 1) Penyusunan Peraturan Daerah dan penyesuaian wewenang penyelenggaraan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; 2) Pembangunan infrastruktur SPAM/SPALD/Persampahan; 3) Memaksimalkan peran PDAM dalam peningkatan kapasitas layanan air minum, penurunan kebocoran (NRW), dan perluasan jaringan layanan air minum; 4) Sosialisasi mengenai kinerja pengelolaan air limbah di IPLT dan Program L2T2/L2T3.

TUJUAN 7 – ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

- Rasio elektrifikasi di Kaltim terus mengalami peningkatan dari 75,90 persen di tahun 2014 menjadi 88,93 persen pada tahun 2019. Adanya pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada sehingga tercatat produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimtara mengalami surplus pada tahun 2018 sebesar 200 MW.
- Berdasarkan permodelan LEAP, bauran energi primer di Provinsi Kaltim tahun 2015 yang paling besar adalah minyak bumi yaitu 67,71 persen dari seluruh sumber energi yang digunakan. Sementara itu bauran energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil di Provinsi Kaltim yaitu hanya 3,13 persen. Pada tahun 2019, bauran energi terbarukan meningkat menjadi 4,48 persen.

Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain 1) Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan faktor luas wilayah; 2) Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama untuk penyaluran tenaga listrik dari sistem borneo ke daerah isolated; dan 3) Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait energi bersih dan terjangkau adalah peningkatan akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal dengan arah kebijakan Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 7 adalah mendorong PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya Listrik Perdesaan dengan cara peningkatan penganggaran dari Pemerintah Pusat selaku Pembina Usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) serta memberi bantuan pemasangan listrik yang bersumber dari PLN melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat perusahaan pertambangan.

TUJUAN 8 – PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

- Pada tahun 2019, kondisi ketenagakerjaan Kaltim menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Agustus 2019 mencapai 6,09 persen atau sebanyak 110.574 orang,

mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2018 yang sebesar 6,60 persen (114.313 orang).

- Kinerja dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal dengan indikator kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB Kalimantan Timur tercapai sebesar 1,02 persen atau dengan capaian 107,37 dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi PDRB Pariwisata untuk sementara dihitung melalui penyediaan jasa akomodasi dan makan minum yaitu sebesar Rp 6.637,39 Milyar. Adapun total kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 653.677,10 Milyar.
- Capaian laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun mengalami kontraksi sebesar 0,55 persen, menurun jauh di bawah target sebesar 1,69 persen. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja di Kaltim. Jumlah penduduk yang bekerja mayoritas pada tahun 2019 masih merupakan lulusan SMA/SMK, yakni sebesar 40 persen.

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah harga komoditas internasional yang cenderung stagnan juga berdampak pada kinerja ekspor komoditas Kaltim yang masih bertumpu pada migas dan batubara, tidak berkembangnya industri pengolahan yang berdampak pada kinerja perdagangan Kaltim, masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum mampu merespon perkembangan pasar kerja.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua, selama lima tahun ke depan, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2020- 2024 yang mencakup 1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi; 2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi; 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM; 4) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM; 5) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat.

Upaya percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dapat dilakukan melalui optimalisasi program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dengan 1) Optimalisasi produktivitas sektor pertanian dalam arti luas; 2) Pengembangan

industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan; dan 3) Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur.

TUJUAN 9 – INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

- Capaian pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas yaitu pada indikator Kondisi mantap jalan provinsi dan Panjang pembangunan jalan tol telah mencapai target. Untuk menunjang konektivitas diperlukan bandara, dermaga penyebrangan dan Pelabuhan. Capaian pada target tahun 2019 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada indikator ini telah tercapai 100%.
- Indikator proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Tahun 2019 capaiannya melebihi target yaitu 13 persen dari target 12 persen. Namun pada indikator proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB dan perkapita masih belum mencapai target.
- Capaian laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan non migas belum bisa mencapai target, bahkan kondisi tahun 2019 capaiannya minus dimana kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target pada Tujuan 9 adalah masih terdapat kondisi jalan yang belum mantap dikarenakan beban sumbu kendaraan yang melalui jalan provinsi melebihi beban rencana/LHR, belum optimalnya integrasi proses hulu-hilir antar sektor, lambatnya pertumbuhan investasi IKM, dan kurangnya daya saing SDM Kaltim dalam sektor industri pengolahan.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tersebut adalah Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan. Sedangkan arah kebijakan yang selaras yakni peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan, peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan dan peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dilaksanakan dengan baik akan mempermudah aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur, salah satunya adalah dalam rangka peningkatan sektor perindustrian dalam perekonomian daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 9 adalah pengalokasian dana setiap tahun untuk tercapainya kondisi mantap jalan di Provinsi

Kalimantan Timur. Dalam upaya transformasi ekonomi di Kaltim, sektor industri merupakan fokus utama dalam pengembangan ekonomi dimana kawasan strategis provinsi yang ada, yakni KEK MBTK, KIK dan Buluminung, Industri Perkayuan, Perkapalan, dan Jasa di Samarinda, serta Kawasan Strategi Pariwisata Derawan dan sekitarnya diharapkan menjadi penggerak pada peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kaltim.

TUJUAN 10 – BERKURANGNYA KESENJANGAN

- Pada Maret 2019, Gini Rasio Kaltim tercatat sebesar 0,33 lebih rendah dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 0,342, dimana distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 20,24 persen, naik 0,55 poin dibandingkan Angka September 2018 (19,69 persen). Namun angka ini masih masuk dalam kategori Ketimpangan Rendah. Pengurangan kesenjangan dengan mengentaskan jumlah daerah yang tertinggal pada tahun 2019 memang baru mencapai 2 desa dari 4 desa yang ditargetkan, namun melihat perkembangan, pada tahun 2020 target realisasi ini akan tercapai.
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur sebesar 77,76. Angka ini mengalami peningkatan 3,79 poin dibandingkan dengan IDI Kalimanta Timur 2018 yang capaiannya sebesar 73,88 meskipun mengalami kenaikan, tingkat demokrasi di Kalimantan Timur masih termasuk dalam Katagori sedang. Meskipun dari tahun 2015 ke tahun 2016 IDI Kaltim mengalami penurunan, tetapi perkembangan dari 2016 hingga 2019 menunjukkan trend meningkat.

Dalam program dan kegiatan mengentaskan jumlah desa tertinggal memang memiliki tantangan tersendiri untuk wilayah Kaltim, dimana kondisi geografis wilayah administrasi desa di Kaltim, terutama yang merupakan kategori desa/kampung tertinggal dan sangat tertinggal sangat sulit dijangkau sehingga memang perlu perhatian lebih dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatannya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam peningkatan aspek kebebasan sipil yakni masih ada 4 Indikator capaian IDI 2019 yang berkategori kurang, pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan yang masih belum optimal.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pengentasan desa tertinggal ialah dengan memebrikan dukungan kebijakan dan penganggaran pemerintah, tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, namun juga oleh Pemerintah Kabupaten. Arah kebijakan untuk konsolidasi demokrasi terdiri atas penguatan kapasitas lembaga demokrasi, Penguatan kelompok kerja IDI, penguatan partai politik, Penguatan

kapasitas DPRD, Penguatan Kapasitas Aparatur Pemda, Penguatan peran masyarakat serta penguatan kualitas komunikasi publik.

Dalam rangka upaya percepatan pengentasan jumlah daerah tertinggal di Kaltim, maka dilakukan penguatan koordinasi dan pembinaan di level Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan Instansi Teknis/Perangkat Daerah terkait dan pendampingan desa. Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat Provinsi, antara lain operasional untuk memperkuat Pokja IDI pemerintah Provinsi, Penguatan Demokrasi Indonesia.

TUJUAN 11 – KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

- Pada Indikator Jumlah Kota Sedang dan Kota Baru yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Baseline (2018) dan 2019 masih berada di angka yang sama yakni 3 Kota.
- Sistem Peringatan Dini yang dipunyai oleh Kaltim masih terbatas di dua (2) kota saja yakni di Samarinda dan Balikpapan.
- Jumlah Kota Hijau yang memiliki Ruang Terbuka Hijau juga masih terbatas pada 3 kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Masih belum terlihat ada upaya untuk membangun Kota Hijau/Kabupaten Hijau yang memiliki Ruang Terbuka Hijau.

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan adalah Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) baru terbatas pada tiga kota besar di Kalimantan Timur saja, Diperlukan adanya pengembangan kota yang baru mengingat Kalimantan Timur merupakan lokasi IKN yang baru, selain itu Sistem Peringatan Dini (SPD) Bencana di Kaltim baru dapat mendeteksi bencana banjir dan longsor sehingga diperlukan SPD Bencana lainnya.

Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan kota dan pemukiman yang berkelanjutan adalah 1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni; 2) Meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana; 3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 ini adalah 1) Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN) di tingkat daerah; 2)

Percepatan Pemenuhan standar Pelayanan Perkotaan (SPP) tidak terbatas pada wilayah kota besar; 3) Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 4) Pengembangan kota pusaka yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 5) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

TUJUAN 12 – KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kinerja Perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang mencapai ranking minimal ranking biru mencapai total 205 perusahaan, yang terdiri dari : peringkat emas 8 perusahaan; peringkat hijau 73 perusahaan; peringkat biru 124 perusahaan. Kinerja ini dinilai melalui kegiatan pemantauan kualitas udara ambien.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 ini adalah 1) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 2) Penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi sumberdaya dan mengurangi limbah B3; 3) Pengembangan standar produk ramah lingkungan; 4) Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

TUJUAN 13 – PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengukuran penurunan emisi gas rumah dengan kegiatan pelaporan dan evaluasi (MRV) Rencana Aksi Daerah-GRK dan minimal menghasilkan 1 (satu) laporan.
- Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tidak mencapai target yang diinginkan sebab banyak daerah di Kaltim yang tidak membuat dokumen strategi yang baru.

Tantangan yang dihadapi terkait Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim adalah Dokumen Strategi PRB yang masih berlaku hanya ada di dua Kabupaten/Kota. Di Kota Samarinda sendiri sebagai Ibukota Provinsi, Strategi PRB yang berlaku hanya sampai dengan 2017 saja (2013-2017). Sementara untuk tingkat Kaltim sendiri hanya berlaku sampai dengan 2016. Padahal Samarinda sebagai Ibukota Provinsi memiliki potensi risiko bencana yang besar.

Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan penanganan perubahan iklim adalah 1) Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2) Meningkatkan kapasitas daerah dalam

mengurangi risiko bencana dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 ini adalah 1) Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya; 2) Sosialisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor, terutama yang berhubungan dengan FCPF-CF; 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK; 4) Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; 5) Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK.

TUJUAN 14 – EKOSISTEM LAUTAN

- Provinsi Kalimantan Timur yang berada di pada 2 WPP yakni pada WPP 713 dan 714 diperkirakan memiliki cadangan produksi perikanan sebesar ±999 ribu Ton Ikan. Dengan jumlah potensi tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada didalamnya guna mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Poros Maritim. Pada tahun 2019 proporsi tangkapan jenis ikan masih berada pada kisaran nilai 35%, artinya tangkapan jenis ikan masih pada batas biologis yang aman.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya *penanganan Illegal, Unreported*, dan *Unregulated* (IUU *Fishing*) dan kegiatan perikanan yang merusak baik yang dilakukan kapal perikanan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Tercatat pada Tahun 2019, persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan mencapai 80 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 34,27 persen.

Berbagai tantangan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan adalah 1) Terbatasnya SDM pengelolaan data baik perikanan tangkap maupun budidaya; 2) Kapasitas kelembagaan pengawas perikanan yang masih terbatas; 3) Pengelolaan yang ramah lingkungan dan memperhatikan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) 5. Minimnya sarpras dan SDM untuk operasional pengawasan terhadap IUU *(Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing* dan *Destructive Fishing*.

Sejalan dengan tantangan yang dihadapi serangkaian arah kebijakan telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 sebagai berikut 1) Perlindungan dan

pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan; 2) peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, dan 3) peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan.

Upaya yang dilakukan dalam percepatan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 14 yaitu dengan penguatan kawasan konservasi kelautan dan perikanan melalui penetapan peraturan (Pergub); penetapan kawasan kelautan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diperkuat oleh peratusan (Perda); dan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan untuk keberlangsungan ekosistem perikanan dan memberikan perlindungan asuransi kepada pelaku usaha (Nelayan).

TUJUAN 15 – EKOSISTEM DARATAN

- Target proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan yakni 50,56 persen dan sampai tahun 2019 telah memenuhi target yang ditentukan mencapai 54,9 persen. Dan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tidak ada penambahan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem sehingga luasan tetap sama sebesar 86.450 Ha.
- Pada tahun 2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) minimal 70 persen mengalami peningkatan yakni penambahan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto yang memperoleh nilai METT sebesar 77 persen.
- Sementara jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tahun 2019 mengalami peningkatan pada masing-masing jenis KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 2, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 17 dan Taman Hutan Raya sebanyak 1.

Kerusakan lingkungan terutama pada ekosistem daratan disebabkan masih terdapatnya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti *illegal logging,* kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa. Selain itu, lahan kritis masih banyak di Kaltim. Upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan terkendala dengan terbatasnya kewenangan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan hanya di luar Kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, strategi terkait ekosistem daratan adalah pengelolaan Kawasan Hutan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan

pengamanan kawasan hutan, pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi serta pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator Tujuan 15 adalah 1) Meningkatkan aktivitas pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan melalui koordinasi dan sosialisasi; 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan RKT; 3) Meningkatkan koordinasi terhadap pemegang ijin yang berada di dalam wilayah Tahura; 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat disekitar Tahura.

TUJUAN 16 – PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

- Capaian pada Tujuan 16 yang sudah cukup baik ditunjukkan oleh akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Capaian lainnya yang cukup baik adalah persentase kepemilikan akta kelahiran untuk anak yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.
- Selain itu, capaian yang cukup baik dari Tujuan 16 ini adalah pada bagian tata kelola pemerintahan, yaitu terkait peningkatan capaian indikator proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di antara berbagai capaian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tujuan 16, yaitu pemberantasan korupsi yang belum optimal, serta pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif. Keterwakilan perempuan yang menduduki posisi atau jabatan sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif masih perlu ditingkatkan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, masih banyak Badan Publik yang belum mencapai kategori informatif. Bahkan, lebih dari 50 persen Badan Publik yang dievaluasi, masuk ke dalam kategori tidak informatif.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2019-2023 yang selaras adalah pengembangan demokrasi di daerah dan peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum Pendidikan sebagai muatan lokal.

Upaya .....

TUJUAN 17 – KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

- Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB naik dari 2 tahun sebelumnya dan tercapai menandakan rasio Pajak Daerah mempengaruhi PDRB Kaltim.
- Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.Mengalami tren naik yang sangat signifikan dan tercapai dari target yang ditetapkan hal ini menandakan bahwa peranan proporsi Pajak Domestik mempunyai pengaruh besar terhadap Anggaran dan sarana prasarana Pembangunan, serta Pertumbuhan Ekonomi Kaltim.
- Target terkait data statistik di Kaltim menunjukan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan 17 adalah ketepatan waktu rilis *(timeliness)* yang masih belum optimal terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik, serta kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah 1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam; 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi; 4) Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 5) Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS; 6) Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Upaya .....

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan						
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
INDIKATOR TPB/SDGs :						
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						
Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana						
Jumlah Peserta Simulasi dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Orang	120	120	Rp 460.823.261	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah Peserta Pelatihan Radio Komunikasi	Orang	30	30			
Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Penanggulangan Bencana	Orang	50	50			
INDIKATOR TPB/SDGs :						
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
Kegiatan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat						
Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana	Orang	30	30	Rp 187.393.000	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-		Pelaksanaan anggaran murni tidak dapat dilaksanakan karena rasionalisasi penanganan covid-19, kegiatan baru	
Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	-		dapat dilaksanakan setelah mendapat ABT tahun 2020 namun tidak sesuai dengan target awal menyesuaikan dengan anggaran ABT yang didapat	
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan RAK Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	-			
Jumlah dokumen Pemetaan Sistem Peringatan Dini Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	-			
Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	-			
Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-			
Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-			
Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	Orang	-	-			
Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana	Peta	-	-			
Jumlah Rambu-rambu Destana	Buah	-	-			
Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana	Laporan	-	-			
Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	-	-			
Jumlah Desa tangguh bencana yang dilakukan pembinaan lanjutan (ABT)	Desa/Kelurahan	2	-			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
INDIKATOR TPB/SDGs :						
1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.						
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						
1.1. Indikator Kegiatan :						
Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia	Unit	-	-	-	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Orang	-	-			
Jumlah logistik penanggulangan bencana	Barang		-			
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana						
Jumlah Peta Rawan Bencana	Peta	-	-	-	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Aksi Daerah (RAD)	Dokumen	-	-		Tahun 2020, Rasionalisasi /	
Jumlah dokumen Rencana	Dokumen	-	-			
1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)						
Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana bagi Relawan dan Masyarakat	Orang	30	30	Rp 32.910.000	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah peserta Forum Kaltim Peduli Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Relawan Peduli Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Wartawan Peduli Bencana (Wapena)	Orang	-	-			
Jumlah sekolah Siaga/Aman	Sekolah	-	-			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah peserta Pramuka Peduli Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Orang	-	-			
Jumlah kegiatan dalam Peringatan Pekan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Nasional	Kegiatan	-	-			
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan						
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
Perbaikan Gizi Masyarakat	kab/kota	10	10	413.026.125	APBD	Dinas Kesehatan
Pembinaan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer (DAK)	Kab/Kota	10	10	456.298.711	DAK	Dinas Kesehatan
Rakontek terpadu tingkat kabupaten dan kota (DAK)	Kab/Kota	10	10	504.765.275	DAK	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Satker (DAK)	Kab/Kota	10	10	73.368.100	DAK	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.						
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
Penguatan program Indonesia sehat melalui pendekatan Keluarga (DAK)	Kab/Kota	10	10	291.068.061	DAK	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penurunan Stunting (DAK)	Kab/Kota	2	2	2.638.580.625	DAK	Dinas Kesehatan
	Kab/Kota	10	10			
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.						
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pengembangan Perbibitan Ternak	Ekor	100	105	3.748.194.938	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Indeks	1.8	1,86			
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.						
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan						
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	ekor	10.000	7.300	581.309.882	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).						
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (jumlah kegiatan penguatan OPD/LS yg mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan)	Kali	3	3			
Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	Kali	5	5	481.776.214	APBD	Dinas Kesehatan
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	Kab/Kota	10	10			
Jumlah RS Pemerintah di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	Rumah Sakit	10	0			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat (DAK)	kab/kota	6	6	849.417.600	DAK	Dinas Kesehatan
	Kali	3	3			
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.						
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (Jumlah Kab/Kota yg dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL)	Kab/Kota	7	7	363.957.198	APBD/DID	Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	Kab/Kota	8	8			
Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	Kab/Kota	1	0			
Rujukan Spesimen (DAK)	Kab/Kota	4	4	34.997.820	DAK	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.						
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (jumlah Kab/Kota yg dilakukan pembinaan dlm prog P2TB utk mencapai CDR ≥70% dan SR ≥90%)	kab/kota	2	2			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dlm prog P2 HIV untuk mencapai persentase ODHA yg mendapatkan ARV ≥55%	Kab/Kota	2	2	325.674.500	APBD/APBN	Dinas Kesehatan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dlm prog P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan malaria positif sesuai standar ≥95%	Kab/Kota	6	6			
Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	Kab/Kota	3	3			
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).						
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan						
Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS (Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC)	Kab/Kota	10	5	6.823.493.973	APBD	Dinas Kesehatan
Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan	orang	131.743	25.893			
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (Jumlah Kab/Kota yg memiliki fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine)	kab/kota	-	1			

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Persentase KLB yang ditangani	%	100	100	643.944.671	APBD	Dinas Kesehatan
Persentase Kejadian bencana yang ditangani	%	100	100			
Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	RSUD	3	3			
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.						
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yg melaksanakan implementasi KTR)	OPD	3	3	25.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota yg melaksanakan implementasi KTR minimal di 50%	%	30	30	208.321.000	APBN	
				108.609.600	APBD	
Jumlah Kab/Kota yg mempunyai minimal 50% Puskesmas yg melaksanakan pelayanan terpadu PTM (Kasus Hipertensi & DM)	Kab/Kota	2	10	227.908.275	APBN	
Jumlah Kab/Kota yg minimal 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	Kab/Kota	3	7	215.800.000	APBN	
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.						
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jenis	30	30	267.795.403	DAK	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Jumlah Fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC)	fasyankes	28	0	2.497.429.400	APBD	Dinas Kesehatan
Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin alat kesehatan	sarana	13	15			
Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	fasyankes	72				
Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin kefarmasian	sarana	15	15	34.556.000	APBN	
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						
Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan						
Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Jumlah Puskesmas daerah DTPK/3T yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar)	Puskes- mas	-	14		APBD	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas						
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	4	4	13.878.052.900,00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.						
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	3	3	1777748847		UPTD Taman Budaya
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)	Dokumen	1	1	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Luar Biasa						
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Orang	1.220	1.220			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Sekolah	9	9	2694593400		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	Orang	95	95	1021889000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Orang	250	196	1940451546		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemenuhan Sarana & Prasarana Tenaga Pendidik	Orang	200	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						
Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Laporan	1	1	1704473441		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerimaaan Peserta Didik Baru	Laporan	1	1	672440874		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
Pembangunan Prasarana Belajar SMA	Sekolah	15	15	219165000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Kab/Kota	10	10			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Sekolah	15	15	11077198754		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Pagar Sekolah	Sekolah	15	15	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Sekolah	15	15	22600966040		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Sekolah	15	15	13833883615		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Sekolah	15	15	13455514990		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Sekolah	15	15	13223016948		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Orang	42.998	42.998			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Penguatan Karakter	Siswa	4.000	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Sekolah	15	15	16880426400		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi (DAK)	Sekolah	15	15	25360975046		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Sekolah	15	15	1895014000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Sekolah	15	15	203048000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	sekolah	15	15	1142320000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	sekolah	15	15	7903738900		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan						
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Kegiatan	10	10	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Sekolah Kejuruan						
Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	Siswa	4.000	1.000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)						
Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kegiatan	10	10	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).						
Program Pendidikan Luar Biasa						
Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	Orang	95	95	1335479650		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 5 Kesetaraan Gender						
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.						
Program Kesetaraan Gender						
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	Kajian	1	1	378.977.887,00	APBD	DKP3A

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Perlindungan Perempuan	orang/peserta	100				DKP3A
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.						
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak						
Perlindungan Anak	orang/peserta	110				DKP3A
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.						
Program Kesetaraan Gender						
Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	kebijakan	-	2	Rp 114.517.170	APBD	DKP3A
	orang/peserta	100				
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak						
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.						
Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan						
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Unit	1	1	29.311.928.166,43	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Unit	-	0			
	Unit	-	0			
	Unit	-	0			
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).						
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Persentase pembinaan Kab/kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan)	%	20	100	274.497.000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.						
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pemantauan lingkungan	Frekuensi	-		122.783.700	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak						
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.						
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)						
Perencanaan	Hektar	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Perencanaan	Hektar	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Perencanaan	Hektar	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Perencanaan	Hektar	100	100	125.002.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Perencanaan	Hektar	100	100	45.540.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Perencanaan	Hektar	450	450	278.026.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Perencanaan	Hektar	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Perencanaan	Hektar	1.605	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Perencanaan	Hektar	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Pelaksanaan	Hektar	86	0	91.423.000	DBH SDA DR	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Pelaksanaan	Hektar	200	0	68.109.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Pelaksanaan	Hektar	100	100	1.780.736.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Pelaksanaan	Hektar	100	100	1.453.338.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Pelaksanaan	Hektar	200	0	10.880.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Pelaksanaan	Hektar	350	350	3.684.276.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Pelaksanaan	Hektar	340	0	17.604.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pelaksanaan	Hektar	600	600	10.701.366.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Pelaksanaan	Hektar	250	0	162.032.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	6	4	322.377.000	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	8	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Monitoring dan Evaluasi	laporan	1	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	DBH SDA DR	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau						
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.						
Program Pengembangan Ketenagalistrikan						
Pembangunan Ketenagalistrikan	Desa	2	-	-		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Laporan	3	3	942.599.889,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Lokasi	20	36	420.434.100,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.						
Program Diversifikasi Energi						
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	DED	4				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengembangan Bioenergi	rumah tangga	75				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	perusahaan	15				
	penyalur	50				
	penyalur	50				
Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air	Laporan	2				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan						
Penggunaan Efisiensi biodiesel pada perusahaan tambang batubara	Perusahaan	29				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun						
Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan						
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Izin/ Non Izin	1.000	741	99.100.000	DID (Tahun Anggaran 2020)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Izin/ Non Izin	1.500	1.611	30.350.000	DID (Tahun Anggaran 2020)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Izin/ Non Izin	-				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	NIB	200	15.148	31.940.000	DID (Tahun Anggaran 2020)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
INDIKATOR TPB/SDGs	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang difasilitasi pengembangannya					
PROGRAM 1 :	Pengembangan Destinasi Pariwisata					
Kegiatan 1						
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan	unit	7 unit	7 unit	1.859.353.523	APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 2 :						
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan	destinasi	4 destinasi	4 destinasi		APBD	Dispar Kaltim

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Kegiatan 3 :						
Pengembangan Wisata Bahari dan Minat Khusus	destinasi	7 destinasi	7 destinasi		APBD	Dispar Kaltim
INDIKATOR TPB/SDGs	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang Dipromosikan					
PROGRAM 2 :	Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
Kegiatan 1 :						
Penguatan Analisis Pasar Pariwisata	Laporan	2 laporan	2 laporan		APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 2 :						
Penguatan Data dan Informasi Pariwisata	Jenis	8 Jenis	8 Jenis		APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 3 :						
Pengembangan Promosi Pariwisata	Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	953.880.700	APBD	Dispar Kaltim
INDIKATOR TPB/SDGs	Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang dikembangkan (orang)					
PROGRAM 3 :	Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata					
Kegiatan 1 :						
Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sadar Wisata	Orang	186 org	186 org		APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 2 :						
Pengembangan Pengendlian Usaha Sarana Pariwisata	Orang	120 org	120 org		APBD	Dispar Kaltim

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Kegiatan 3 :						
Peningkatan SDM dan Profesionalisme Usaha Jasa Pariwisata	Orang	100 org	100 org	1.000.000.000	APBD	Dispar Kaltim
INDIKATOR TPB/SDGs	Jumlah Pelaku Ekraf yang diekmbangkan (orang)					
PROGRAM 4 :	Pengembangan Karya Seni Budaya					
Kegiatan 1 :						
Pengembangan Seni Pertunjukan	Orang	30 org	30 org	1.400.000.000	APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 2 :						
Pengelolaan Karya Seni Budaya	Orang	120 org	120 org		APBD	Dispar Kaltim
Kegiatan 3 :						
Pengembangan Wisata Budaya	Orang	120 org	120 org		APBD	Dispar Kaltim
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.						
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
Pembangunan Jalan	Km	7.75	47,34	263.108.591.009,11	APBD	Dinas PUPR
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.						
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Perencanaan	2	1	4.175.267.804,15	APBD 1	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP						
Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	(Unit/%)	1	1	1.824.237.497,00	APBD 1	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.						
Program Tata Lingkungan						
Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	%	-		235.875.577	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Perusahaan	-		-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	LKPM	4	4	58.819.000	DID (Tahun Anggaran 2020)	
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Perusahaan	-		-		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Perusahaan	10	22	353.600.000	DID (Tahun Anggaran 2020)	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan						
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal						
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						
Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Unit	15	15	202.558.600	APBD	DPMPD
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan						
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten/Kota	10	10	511.224.190	APBD	DPMD
Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Kabupaten	7	7	136.491.655	APBD	DPMPD
Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten/Kota	10	10	483.204.998	APBD	DPMPD
Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten	5	5	223.551.840	APBD	DPMPD
	Orang	50	50			
Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan	1	1	174.623.125	APBD	DPMPD
Penguatan Informasi Pembangunan	kali	1	1	147.658.699	APBD	DPMPD

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Program Kampung Iklim +						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Kampung/Desa/ Kelurahan	15	0	0	APBD	DPMPD
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia						
Program pendidikan politik masyarakat						
Penyusunan IDI	Orang	350	350	2.223.014.820	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan						
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.						
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas						
Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)	Unit	5	5	26.771.311.034,75	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
JumlahRumah Tidak Layak Huni yang ditangani	unit	200	200	5.741.913.270,70	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh						
Luas kawasan kumuh yang ditangani	ha	11	12,52	7.774.988.954,35	APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR SDGs: 11.2.1.(b). Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota						
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekeretaapian	Lintasan	-	0	0	APBD 1	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang						
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pengelolaan sampah	%	-		147.019.600	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan						
INDIKATOR TPB/SDGs :						
11.5.1. (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan						
Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Orang	-	-	Rp 108.741.200	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana	Dokumen	-	-			
Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS)	Unit	-	-			
Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS)	Unit	-	-			
Jumlah lokasi montoring daerah Rawan Bencana	Kab/Kota	9	9			
Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review	Dokumen	-	-			
Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan	Media	-	-			
Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	Aplikasi	-	-			
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap						
INDIKATOR TPB/SDGs :						
11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah						
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Orang	-	-		APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana	Orang	-	-			
Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional	Orang	-	-			
Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1			
Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	-	-			
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga	Orang	-	-			
Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana	Kab/Kota	-	-			
Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	Kab/Kota	-	-			
Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	Orang	-	-			
Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan	Dokumen	-	-			
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan						
INDIKATOR TPB/SDGs :						
11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang						
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	Kali	17	17		APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	Laporan	2	2		Anggaran termasuk BTT Tahap I penanganan covid-19	
Jumlah operasi penangan kejadian bencana	Kali	20	20			
2.1. Indikator Kegiatan : Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	Kab/Kota	10	10	-	APBD	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah laporan pemantauan titik panas	Laporan	12	12			
Jumlah laporan pemantauan early warning system	Laporan	12	12			
Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan	Laporan	12	12			
Jumlah Laporan Kegiatan Pusdalops PB	Laporan	12	12			
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab						
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.						
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup						
Pengendalian pencemaran lingkungan	%	-				Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3						
Pengelolaan limbah B3	Ton	-			APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim.						
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
INDIKATOR TPB/SDGs :						
13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang						
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana						

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana					APBD Tahun 2020, Rasionalisasi / tidak dapat dilaksanakan	BPBD Prov. Kaltim
Jumlah Peserta Bimtek Radio Komunikasi	Orang	-	-			
Jumlah peserta Bimtek SAR	Orang	-	-			
Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang	-	-			
Indikator SDGs: 13.2.1.(a)Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)						
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan				763.539.230 (96,04%)	APBD	Dinas Perkebunan
Pengembangan energi baru terbarukan di sektor	Perusahaan	1		134.540.600 (94,458%)	APBD	Dinas Perkebunan
Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Ha Cadangan Carbon Rendah/tahun	10.000	50.487	128.506.400 (96,33%)	APBD	Dinas Perkebunan
Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	PMS			-	APBD	Dinas Perkebunan
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)						
Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah						
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	kali	1	1	20.658.519	APBD	Biro Perekonomian
Tujuan 14 Ekosistem Lautan						
INDIKATOR SDGs : 14.5.1 Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan						
Program Pengelolaan Ruang Laut						
Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Kawasan	4	4	755.077.581	APBD	DKP Prov.Kaltim

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
INDIKATOR SDGs : 14.6.1.(a) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha						
Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Hari Operasi	10	10	561.699.468	APBD	DKP Prov.Kaltim
INDIKATOR SDGs : 14.6.1.(b) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi						
Program Pengembangan Perikanan Tangkap						
Kegiatan Pengelolaan	KUB	60	60	2.458.667.825	APBD	DKP Prov.Kaltim
Penangkapan Ikan dan	NTN	100	100			
Tujuan 15 Ekosistem Daratan						
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.						
Program Pengelolaan DAS dan RHL						
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	38.500	66.302	202.254.000	APBD Murni	Dinas Kehutanan
Perencanaan	Hektar	-	0	-	APBD Murni	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan	Hektar	350	301	4.455.703.000	APBD Murni	Dinas Kehutanan
Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	0	-	APBD Murni	Dinas Kehutanan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
INDIKATOR SDGs: 16.3						
Program Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan						
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Orang	10	12	1.533.400.000	APBN	Kemenkumham
INDIKATOR SDGs: 16.10						
Program Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Berkas Pengaduan	3	4	255.714.000	APBN	Kemenkumham

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	%	1	3	255.714.000	APBN	Kemenkumham
INDIKATOR SDGs: 16.b						
Program Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.						
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan/Dokumen	387	390	255.714.000	APBN	Kemenkumham
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan						
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak						
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Rupiah	28.616.725.000	26.494.287.130	830.564.845	APBD	BAPENDA PROV KALTIM
Koordinasi Penerimaan lain-lain	Rupiah	224.523.866.374	392.379.951.610	366.174.467	APBD	BAPENDA PROV KALTIM
	Rupiah	779.823.762.176	1.152.460.139.510			
	Rupiah	36.827.031.200	42.969.342.000			
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rupiah	3.038.477.121.500	3.207.168.795.642	738.072.172	APBD	BAPENDA PROV KALTIM
	Rupiah	815.693.641.000	815.693.641.000			
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
Program Koordinasi Pajak Daerah						
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Rupiah	800.000.000.000	1.007.247.015.109	2.914.994.250	APBD	BAPENDA PROV KALTIM

Program/Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2019	2019	2019		
	Rupiah	800.000.000.000	993.609.883.249			PROV KALTIM
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Rupiah	2.600.000.000.000	2.799.415.975.548	1.216.665.178	APBD	BAPENDA PROV KALTIM
	Rupiah	10.000.000.000	10.784.004.365			
	Rupiah	210.000.000.000	173.463.638.888			
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi						
Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa						
Peningkatan Sinerji Kebijakan Perekonomian Daerah	laporan	3	3	595.540.547	APBD	Biro Perekonomian
INDIKATOR SDGs:						
Program Kebijakan						
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	kali	3	7	543.198.816	APBD	Biro Perekonomian

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 02 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044